

**PERAN AMERIKA SERIKAT DALAM OPTIMALISASI
THAILAND ANTI-TRAFFICKING IN PERSONS TASK FORCE
(TATIP) DAN *THAILAND INTERNET CRIMES AGAINST
CHILDREN TASK FORCE* (TICAC) UNTUK MENGATASI
HUMAN TRAFFICKING DI THAILAND TAHUN 2018-2021**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Bidang Hubungan Internasional**



Oleh:

Lailatun Nasukha

NIM. I92219076

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
JULI 2023**

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULIS

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lailatun Nasukha
NIM : I92219076
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : **Peran Amerika Serikat dalam Optimalisasi Thailand Anti-Trafficking in Persons Task Force (TATIP) dan Thailand Internet Crimes Against Children Task Force (TICAC) untuk Menangani Human Trafficking di Thailand Tahun 2018-2021**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga Pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 21 Juli 2023
Yang menyatakan



Lailatun Nasukha
NIM: I92219076

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Lailatun Nasukha

NIM : 192219076

Program Studi : Hubungan Internasional

Yang berjudul: **Optimalisasi *Thailand Anti-Trafficking in Persons Task Force (TATIP)* dan *Thailand Internet Crimes Against Children Task Force (TICAC)* dalam Menangani *Human Trafficking* di Thailand Tahun 2018-2021**, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 08 Juni 2023
Pembimbing



Zudan Rosyidi, MA.
NIP. 198103232009121004

PENGESAHAN

Skripsi oleh Lailatun Nasukha dengan judul: “*Optimalisasi Thailand Anti-Trafficking in Persons Task Force (TATIP) dan Thailand Internet Crimes Against Children Task Force (TICAC) dalam Menangani Human Trafficking di Thailand Tahun 2018-2021*” telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 18 Juli 2023.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



Zudan Rosyidi, SS. MA
NIP. 198103232009121004

Penguji II



Nur Luthfi Hidayatullah, S.IP., M.Hub.Int.
NIP. 199104092020121012

Penguji III



Rizki Ramadini Nurika, S.Hub.Int., M.A.
NIP. 199003252018012001

Penguji IV



Dr. Iva Yulianti Umdatul Izzah, S. Sos, M.Si.
NIP. 197607182008012022

Surabaya, 18 Juli 2023

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dekan

Abdul Chalik, M.Ag.
NIP. 196109206272000031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lailatun Nasukha
NIM : 102219076
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu politik
E-mail address : lailatunnasukha@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Peran Amerika Serikat dalam Optimalisasi Thailand Anti-Trafficking
in persons Task Force (TATIP) dan Thailand Internet Crimes Against
Children Task Force (TICAC) untuk Menangani Human Trafficking
di Thailand Tahun 2018-2021

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Juli 2023

Penulis


(Lailatun Nasukha)

ABSTRACT

Lailatun Nasukha, 2023, United States Role in Thailand Anti-Trafficking in Persons Task Force (TATIP) and Thailand Internet Crimes Against Children Task Force (TICAC) Optimization for Dealing with Human Trafficking Case in Thailand 2018-2023, Undergraduate Thesis for International Relations Program, Faculty of Social and Political Sciences, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Keywords: *Optimization, Human Trafficking, Thailand Strategy*

This research discusses the United States Role in the Thailand Anti-Trafficking in Persons Task Force (TATIP) and Thailand Internet Crimes Against Children Task Force (TICAC) optimization for dealing with Human Trafficking Case in Thailand. In dealing with human trafficking, Thailand refers to Anti-Human Trafficking B.E. and 5P's Strategy Framework including policy, prosecution, protection, prevention and partnership. The implementation of this policy was less than optimal because there was no agency to implement it, which later emerged TATIP and TICAC. This research will describe United States Role in the Thailand Anti-Trafficking in Persons Task Force (TATIP) and Thailand Internet Crimes Against Children Task Force (TICAC) optimization for dealing with Human Trafficking Case in Thailand 2018-2021. This research uses descriptive qualitative methods with data collection techniques through literature study or documents. The researcher uses role, countering human trafficking, capacity building and foreign aid diplomacy concepts in viewing the phenomenon of human trafficking in Thailand. This research found that the United States roles in handling cases of human trafficking in Thailand including, first, providing training assistance through the FBI and HSI. Secondly, provision of information through direct access to NCMEC reports. The involvement of the FBI, HSI and NCMEC assisted Thailand in capacity building for optimizing the work of TATIP and TICAC. Third, financial support through USAID.

ABSTRAK

Lailatun Nasukha, 2023, Peran Amerika Serikat Dalam Optimalisasi *Thailand Anti-Trafficking in Persons Task Force* (TATIP) dan *Thailand Internet Crimes Against Children Task Force* (TICAC) dalam Menangani *Human Trafficking* di Thailand Tahun 2018-2021, Skripsi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci: Optimalisasi, Perdagangan Manusia, Strategi Thailand

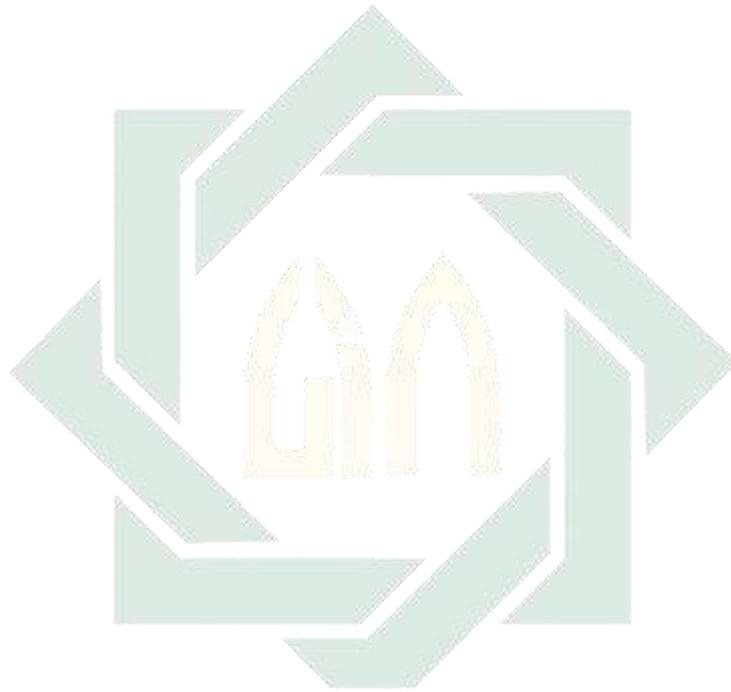
Penelitian ini membahas tentang Peran Amerika Serikat dalam Optimalisasi *Thailand Anti-Trafficking in Persons Task Force* (TATIP) and *Thailand Internet Crimes Against Children Task Force* (TICAC) untuk Menangani Perdagangan manusia di Thailand. Dalam menangani perdagangan manusia, Thailand merujuk pada undang-undang *Anti-Trafficking B.E.* dan melalui strategi 5P yakni *Policy, Prosecution, Protection, Prevention, Partnership*. Penerapan kebijakan tersebut kurang optimal dikarenakan belum adanya Lembaga yang mengimplementasikannya yang kemudian muncul TATIP dan TICAC. Peneliti akan mendeskripsikan bagaimana Peran Amerika Serikat dalam Optimalisasi TATIP dan TICAC untuk Menangani Perdagangan manusia di Thailand Tahun 2018-2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan Teknik pengumpulan data studi literatur atau melalui dokumen. Peneliti menggunakan konsep *role, countering human trafficking, capacity building* dan *foreign aid diplomacy* dalam melihat fenomena perdagangan manusia di Thailand. Penelitian ini menemukan bahwa peran Amerika Serikat dalam penanganan kasus perdagangan manusia di Thailand berdasarkan konsep *regional protector* diantaranya ialah, pertama, pemberian bantuan pelatihan melalui FBI dan HSI. Kedua, pemberian informasi melalui akses langsung pada laporan NCMEC. Keterlibatan FBI, HSI dan NCMEC membantu Thailand dalam peningkatan kapasitas untuk pengoptimalan kerja dari TATIP dan TICAC. Ketiga, bantuan dana atau *foreign aid* melalui USAID.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULIS.....	vii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Argumentasi Utama	19
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II LANDASAN KONSEPTUAL.....	23
A. Role	23
B. Optimization	29
C. Countering Human Trafficking	31
D. Capacity Building	38
E. Foreign Aid Diplomacy	41
BAB III METODE PENELITIAN	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kasus Perdagangan Manusia di Thailand Pada Tahun 2017-2021	3
Gambar 3.1 Proses TICAC Dalam Menangani Kasus Eksploitasi Seksual Anak .	79
Gambar 4.1 Pencapaian Utama TICAC Tahun 2021	83



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2014-2015, Pemerintah Amerika Serikat melalui Departemen Luar Negerinya mengategorikan Pemerintah Thailand pada Tier Tier 3 dalam laporan TIP (*Trafficking in Persons*).¹ Laporan *Trafficking in Persons* (TIP)² adalah alat diplomasi utama pemerintah AS untuk melibatkan pemerintah asing dalam perdagangan manusia.³ Berdasarkan penempatan pada Tier 3 tersebut, Thailand dinilai buruk dalam penanganan kasus perdagangan manusia.

Thailand menjadi negara yang menempati urutan pertama dalam perdagangan manusia yakni sebesar 1.899 per tahunnya di Asia Tenggara. Berkembangnya kasus *human trafficking* di Thailand dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, letak geografisnya yang berbatasan secara langsung dengan negara-negara yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, seperti Laos dan Kamboja, Bangladesh dan Myanmar dari jalur laut yang bisa dikatakan cukup strategis untuk dimanfaatkan bagi para pelaku perdagangan manusia.

¹ Yossapon Jirawut, "Anti-Trafficking Trough Reporting: The Case of The TIP Report and Thailand," *Burapha Journal of Political Economy*, 2558 (2017): 90–125.

² Laporan TIP mengategorikan 185 negara termasuk Amerika Serikat menjadi empat tingkatan berdasarkan tingkat upaya pemerintah masing-masing untuk mengatasi perdagangan manusia: Tingkat 1 (terbaik) dengan negara dan wilayah yang pemerintahnya mematuhi standar minimum sepenuhnya, Tingkat 2 dengan negara dan wilayah yang pemerintahnya tidak sepenuhnya mematuhi standar minimum tetapi melakukan upaya yang signifikan untuk memenuhi standar tersebut, Daftar Pengawasan Tingkat 2 dengan negara dan wilayah yang pemerintahnya tidak sepenuhnya mematuhi standar minimum tetapi melakukan upaya signifikan untuk menyesuaikan diri dengan standar tersebut, dan Tingkat 3 (terburuk) dengan negara dan wilayah yang pemerintahnya tidak sepenuhnya mematuhi standar minimum dan tidak melakukan upaya signifikan untuk melakukannya. Tiga negara tambahan yakni Libya, Somalia, dan Yaman ditetapkan sebagai "Kasus Khusus" tanpa peringkat tingkat karena ketidakstabilan politik dan ketidakmampuan untuk mendapatkan informasi pemerintah yang relevan. Lihat <https://traffickinginstitute.org/what-is-the-trafficking-in-persons-report/>

³ U.S. Department of State, "Trafficking in Persons Report - United States Department of State," accessed December 5, 2022, <https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/>.

Kedua, kondisi perekonomian dalam negeri Thailand sendiri. Thailand menjadi negara tujuan utama yang paling banyak didatangi para pengunjung dengan tujuan memperbaiki kehidupan mereka, hal ini kemudian menjadikan negara Thailand sering disebut sebagai negara kaya akan imigran.⁴ Selain itu, Agama Buddha sebagai agama besar di Thailand juga tampaknya memberikan ruang toleransi terhadap perkembangan perdagangan manusia. Dalam pemahaman Buddhis, perempuan memiliki tanggung jawab lebih untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.⁵ Hal ini menandakan bahwa berkembangnya kasus perdagangan manusia di Thailand tidak hanya dilatarbelakangi oleh faktor negara saja, namun juga konstruksi sosial didalamnya.

Korban perdagangan manusia di Thailand biasanya sebagian besar akan diperdagangkan kembali ke negara lainnya, dengan kata lain negara tersebut dapat disebut sebagai negara transit bagi korban perdagangan manusia yang selanjutnya akan diperdagangkan di luar Thailand.⁶ Burma, Khmer, Laos, dan etnis minoritas diperdagangkan melalui Thailand ke negara lain seperti Malaysia, Jepang, Eropa, dan Amerika Utara.⁷ Selain sebagai negara transit, Thailand juga merupakan negara penghasil perdagangan manusia dan negara tujuan perdagangan manusia.

⁴ Sylvi Nur Hafiza, "The Handling of Human Trafficking in Thailand in The Perspective Human Rights," n.d.

⁵ Natalia Sihotang and Channarong Wiriya, "Human Trafficking in Thailand in Perspective of Human Rights Law," *Journal of Law and Legal Reform* 2 (2021): 505–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v2i4.48760>.

⁶ Hafiza, "The Handling of Human Trafficking in Thailand in The Perspective Human Rights."

⁷ Nodwarang Niamvanichkul, "Human Trafficking For Sexual Exploitation In Southeast Asia" (University of Central Florida, 2013), <http://stars.library.ucf.edu/etd/2670>.

Laporan Perdagangan Manusia Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Amerika Serikat. Hal ini tentu menunjukkan peningkatan berarti dibandingkan periode pelaporan negara Thailand pada tahun 2017 yang berada pada tingkatan *tier 2 watch list* atau daftar pengawasan pada tingkat 2.⁹

Perdagangan manusia yang menjadi cakupan keamanan manusia, merupakan salah satu permasalahan pelik yang masih masif terjadi sampai saat ini. Menurut Kleemans, perdagangan manusia berhubungan dengan eksploitasi dengan penggunaan kekerasan, penipuan, paksaan atau penipuan, dan terutama mengacu pada prostitusi paksa atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penghambaan, dan pemindahan organ.¹⁰

UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) mendefinisikan perdagangan manusia sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang dengan paksa, kecurangan atau penipuan, dengan tujuan untuk memanfaatkan mereka dalam mendapatkan keuntungan. Pria, wanita, dan anak-anak dari segala usia dan dari semua latar belakang dapat menjadi korban kejahatan ini, yang terjadi di setiap wilayah di dunia. Para pedagang sering menggunakan kekerasan atau agen tenaga kerja palsu dan janji palsu pendidikan dan kesempatan kerja untuk menipu dan memaksa korban mereka.¹¹ PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) sendiri

⁹ U.S. Department of State, "2018 Trafficking in Persons Report: Thailand," U.S. Department of State, 2018, <https://www.state.gov/reports/2018-trafficking-in-persons-report/thailand/>.

¹⁰ Edward R. Kleemans, "Expanding the Domain of Human Trafficking Research: Introduction to the Special Issue on Human Trafficking," *Trends in Organized Crime* 14, no. 2–3 (2011): 95–99, <https://doi.org/10.1007/s12117-011-9139-8>.

¹¹ United Nations Office on Drugs and Crime, "Human-Trafficking," United Nations Office on Drugs and Crime, accessed September 26, 2022, <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/human-trafficking.html>.

telah membagi perdagangan manusia dalam tiga kategori, yakni perdagangan seks, perdagangan tenaga kerja, dan pengambilan organ. Secara global, sekitar 1.000.000 orang diperkirakan untuk diperdagangkan setiap tahunnya, dengan estimasi antara 20.000 dan 50.000 diperdagangkan ke Amerika Serikat, di mana negara tersebut menjadi salah satu tujuan terbesar bagi korban perdagangan seks.¹²

Menurut Caballero dan Anthony, perdagangan manusia menjadi salah satu kejahatan terorganisir yang paling menguntungkan di dunia saat ini dengan menghasilkan lebih dari \$150 miliar per tahun. Berdasarkan data *Global Walk Free Foundation Global Slavery Index* tahun 2016, dua pertiga dari korbannya atau 25 juta orang, berada di Asia Timur dan Pasifik. Menurut *Global Report on Trafficking in Persons* Tahun 2016 yang diterbitkan oleh United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC), tercatat lebih dari 85% korban telah diperdagangkan dari dalam kawasan tersebut. China, Jepang, Malaysia, dan Thailand menjadi destinasi tujuan dari negara tetangga. Menurut *Global Walk Free Foundation Global Slavery Index* tahun 2016, Thailand menjadi tujuan utama bagi korban perdagangan manusia di Asia Tenggara dari negara asal Kamboja, Laos, dan Myanmar. Sedangkan Malaysia menjadi tujuan para korban dari Indonesia, Filipina, dan Vietnam.¹³

Dalam menangani perdagangan manusia, pemerintah Thailand melakukan berbagai cara seperti menerbitkan undang-undang anti perdagangan

¹² Leonard A. Steverson and Alese C Wooditch, "Human Trafficking," Britannica, accessed September 26, 2022, <https://www.britannica.com/topic/human-trafficking>.

¹³ Mely Caballero and Anthony, "Human Trafficking in Southeast Asia," International Monetary Fund, 2018, <https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2018/09/human-trafficking-in-southeast-asia-caballero>.

manusia yang dikenal sebagai *Anti Human Trafficking B.E 2551*, pembentukan *5P's Strategy Framework*, pembentukan badan yang menangani kasus perdagangan manusia yaitu *Thailand Anti-Trafficking in Persons Task Force* (TATIP), pembentukan badan yang menangani kasus eksploitasi anak secara *online* yang bernama *Thailand Internet Crimes Against Children Task Force* (TICAC), bekerja sama dengan lembaga dalam negeri maupun luar negeri dan menerbitkan laporan perdagangan manusia setiap tahunnya.

Selain itu, pemerintah Thailand juga melakukan peningkatan kapasitas penegak hukum dan petugas peradilan, LSM tentang undang-undang anti perdagangan manusia dan undang-undang perburuhan, identifikasi korban, investigasi yang berpusat pada korban serta aplikasi teknologi modern. Peningkatan kapasitas petugas salah satunya dari ATPD (*Anti-Trafficking in Persons Division*) Biro Investigasi Pusat dilakukan dengan menyelesaikan 16 seminar dan program pelatihan pada tahun 2018 dan membangun kemitraan dengan ASEAN serta negara lain dimana salah satunya termasuk Amerika Serikat.¹⁴

Kerjasama dengan *stakeholder* terkait seperti NGO (*Non-governmental Organisation*), organisasi internasional seperti ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) maupun kerjasama bilateral antar dua negara yang erat, sangat penting untuk dilakukan di samping upaya antar pemerintah dalam negeri negara Thailand dalam menangani kasus perdagangan manusia di dalam negara tersebut. Hal ini menimbang bagaimana kasus perdagangan manusia

¹⁴ Thailand Government, "Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts 2018."

yang bersifat melintasi batas negara atau bersifat transnasional dengan melibatkan masyarakat antar negara dengan ancaman yang bersifat global.

Thailand Anti-Trafficking in Persons Task Force (TATIP) yang dibentuk pada tahun 2018 merupakan langkah yang diambil Thailand dalam memperkuat komitmennya untuk memberantas perdagangan manusia. Dalam pembentukannya, TATIP telah memulai dengan 29 kasus perdagangan manusia dengan keterlibatan bantuan dari korbannya yang berjumlah 48 korban dan berakhir dengan penuntutan 69 pelanggar. Selain melakukan kerja sama dengan berbagai *stakeholder* dalam negerinya untuk menjalankan tugas, TATIP juga bekerja sama dengan pemerintah asing terkait bidang tersebut. Beberapa kasus hasil kerja sama yang dilakukan dengan pemerintah asing diantaranya seperti tindakan penyelamatan korban perdagangan Kamboja di kapal penangkap ikan bernama Chokchainavee 35 dan penangkapan lima tersangka berkat kerja sama TATIP dengan pihak berwenang Maladewa, selain itu juga saat terjadinya penumpasan yang berhasil berkat operasi jaringan perdagangan manusia Thailand di Jerman dan Thailand karena kerjasama TATIP dengan Kepolisian Jerman.¹⁵

Di samping pembentukan TATIP dalam penanganan perdagangan manusia, Thailand telah terlebih dahulu melakukan pembentukan *Thailand Internet Crimes Against Children Task Force* (TICAC) pada tahun 2015. Pada tahun 2018, TICAC bukan hanya menghasilkan peningkatan jumlah penindasan eksploitasi seksual anak secara online, tapi juga mendukung keberadaan

¹⁵ Thailand Government.

lembaga penegak hukum lainnya dalam penangkapan, penindasan, dan penuntutan kasus perdagangan manusia. Di tahun yang sama, pelaku perdagangan orang dalam 14 kasus telah ditangkap oleh TICAC yang bekerjasama dengan instansi pemerintah dan LSM lain, serta Divisi Anti Perdagangan Orang (ATPD). Penyelidikan yang dilakukan Lembaga tersebut ialah menggunakan pendekatan yang berpusat pada korban dan membantu 107 korbannya.¹⁶

Amerika Serikat sebagai salah satu negara tujuan dan dalam komitmennya untuk membantu negara-negara di dunia dalam menangani kasus perdagangan manusia, juga membantu Thailand dalam menangani permasalahan tersebut. Langkah yang diambil oleh Amerika Serikat dalam memerangi perdagangan manusia global ialah melalui *Trafficking in Persons Report* (TIP) yang merupakan sebuah laporan tahunan yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri dalam mengamati sejauh mana perkembangan negara-negara di dunia dalam tanggung jawab mereka untuk menangani kasus perdagangan manusia di negara masing-masing. Laporan TIP tersebut dinilai paling komprehensif dengan penilaiannya yang hampir mencakup upaya 200 negara di dunia.¹⁷ Laporan ini sangat berguna bagi negara-negara yang masuk dalam daftar untuk diawasi, utamanya dalam pemenuhan kepentingan nasional seperti dalam bidang ekonomi yang salah satunya berpengaruh pada pemberian bantuan luar negeri AS terhadap negara yang dituju.

¹⁶ Thailand Government.

¹⁷ Brianna Gehring, "What Is the Trafficking in Persons Report?," Human Trafficking Institute, accessed November 6, 2022, <https://traffickinginstitute.org/what-is-the-trafficking-in-persons-report/>.

oleh pemerintah AS dalam pendanaan penanganan perdagangan manusia di Thailand melalui *The USAID Thailand Counter Trafficking in Persons Project* (USAID Thailand CTIP) senilai \$10 juta dengan jangka waktu lima tahun dimulai dari 31 Januari 2018.²¹ Dengan berbagai perbaikan yang dilakukan, Thailand berhasil menempati Tier 2 pada tahun 2018.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas, penelitian yang akan dilakukan penulis ialah memaparkan bagaimana Peran Amerika Serikat dalam Optimalisasi *Thailand Anti-Trafficking in Persons Task Force* (TATIP) dan *Thailand Internet Crimes Against Children Task Force* (TICAC) melalui konsep *capacity building* yang dibantu pemerintah AS dalam efektivitas kerjanya untuk menangani kasus perdagangan manusia. Selain itu, peran pemerintah Amerika Serikat dalam menangani perdagangan manusia di Thailand juga dilihat oleh peneliti melalui konsep *foreign aid diplomacy* akibat adanya bantuan berupa sejumlah uang. Pembahasan tersebut menarik minat peneliti untuk dikaji dan dijadikan bahan penelitian. Alasan yang mendasari penelitian ini ialah bagaimana masifnya kasus perdagangan manusia di negara Thailand yang bersifat transnasional yang juga menjadikan Amerika Serikat sebagai negara tujuan dalam mengoperasikan kejahatan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Didasarkan atas latar belakang masalah yang telah disebutkan, rumusan masalah penelitian ini ialah: **Bagaimana Peran Amerika Serikat dalam**

²¹ Reliefweb, "USAID Announces Project to Help Counter Trafficking in Persons in Thailand," reliefweb, accessed October 2, 2022, <https://reliefweb.int/report/thailand/usaid-announces-project-help-counter-trafficking-persons-thailand>.

Optimalisasi *Thailand Anti-Trafficking in Persons Task Force* (TATIP) dan *Thailand Internet Crimes Against Children Task Force* (TICAC) untuk Menangani *Human Trafficking* di Thailand pada tahun 2018-2021?

C. Tujuan Penelitian

Dengan permasalahan penelitian yang telah dijelaskan di atas, tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam disini adalah: Menjelaskan bagaimana Peran Amerika Serikat dalam Optimalisasi *Thailand Anti-Trafficking in Persons Task Force* (TATIP) dan *Thailand Internet Crimes Against Children Task Force* (TICAC) dalam Menangani *Human Trafficking* di Thailand pada tahun 2018-2021.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bisa diklasifikasikan dalam dua aspek.

1. Manfaat Akademis

Pada manfaat akademis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam bidang ilmu hubungan internasional khususnya pada permasalahan perdagangan manusia, penanganan perdagangan manusia dan peran pemerintah suatu negara dalam menangani perdagangan manusia. Peneliti juga menaruh harapan terkait adanya pengembangan lebih lanjut mengenai penelitian Peran Amerika Serikan dalam Optimalisasi *Thailand Anti-Trafficking in Persons Task Force* (TATIP) dan *Thailand Internet Crimes Against Children Task Force* (TICAC) untuk Menangani *Human Trafficking* di Thailand bagi peneliti lainnya untuk kedepannya.

2. Manfaat Praktis

kebijakan baru oleh pemerintah Thailand yakni *5 Plan Strategy* dari kebijakan sebelumnya, dan keberhasilan kebijakan baru tersebut dalam penanganan *human trafficking*. Hasil dari skripsi ini ialah pemberlakuan kebijakan baru dilatarbelakangi keterlibatan pejabat pemerintah Thailand dari sektor angkatan daratnya yang ikut terlibat dalam kasus perdagangan manusia dengan pemanfaatan jabatan yang dimilikinya untuk mengarahkan kelompok kejahatan yang terlibat. Pendekatan 5P tersebut dinilai menghasilkan kemajuan yang cukup baik dengan adanya Kerjasama internasional antara pemerintah Thailand dengan actor internasional terkait. Yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penulis mengambil salah satu contoh aktor negara yang berperan juga dalam menangani *human trafficking* di Thailand yakni Amerika Serikat. Selain itu, penulis juga mengambil latar waktu kejadian yakni pada tahun 2018-2021.

Literatur kedua yang menjadi acuan peneliti adalah skripsi karya Ayu Idrayeni Y. Thalib tahun 2020 yang berjudul “Analisis Sekuritisasi Kasus *Human Trafficking* Di Thailand Tahun 2014-2019”²⁴. Skripsi ini memiliki tujuan dalam mengetahui peran pemerintah Thailand sendiri dalam mengatasi masalah *human trafficking* di negaranya dan penerapan sekuritisasi pada kasus tersebut. Hasil dari skripsi tersebut pemerintah Thailand menangani kasus perdagangan manusia dengan merevisi undang-undang lama mereka, menambahkan undang-undang baru terkait perdagangan manusia dan bekerjasama dengan organisasi internasional yakni *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC) melalui

²⁴ Ayu Idrayeni Y. Thalib, “Analisis Sekuritisasi Kasus Human Trafficking Di Thailand Tahun 2014-2019” (Universitas Islam Indonesia, 2020).

Thai Institute of Justice (TIJ). Penggunaan konsep sekuritisasi dilakukan setelah kemerosotan pemeringkatan Thailand dalam ranking *Tier* yang diberikan oleh Pemerintah Amerika Serikat dalam penanganan perdagangan manusia negara-negara di dunia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penulis menggunakan konsep *capacity building* dalam menganalisis dan tahun 2018-2021 sebagai tahun analisis. Selain itu, penulis lebih menekankan pada optimalisasi kinerja salah dua badan Thailand dalam memerangi perdagangan manusia di negaranya yakni TATIP dan TICAC.

Literatur ketiga ialah artikel karya Peri Anda Hubeahan tahun 2018 dengan judul “Kerjasama Amerika Serikat Dan Thailand Dalam Menangani Kasus *Slavery and Human Trafficking* Di Industri Perikanan Thailand 2013-2017”²⁵. Tujuan dari artikel ini ialah mengetahui bagaimana bentuk Kerjasama yang dilakukan antara negara Amerika Serikat dan Thailand dalam menangani kasus perbudakan serta perdagangan manusia yang dikhususkan dalam sektor industri perikanan Thailand. Perbedaan antara artikel ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis menggunakan jangkauan waktu di tahun 2018-2021 dalam menangani kasus perdagangan manusia di Thailand. Selain itu, penulis juga tidak hanya berfokus pada kasus di industri perikanan Thailand, namun juga kasus perdagangan manusia di berbagai sektor dalam negeri Thailand.

²⁵ Peri Anda Hubeahan, “Kerjasama Amerika Serikat Dan Thailand Dalam Menangani Kasus *Slavery and Human Trafficking* Di Industri Perikanan Thailand 2013-2017,” *Journal of International Relations* 4 (2018): 905–11, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihiWebsite:http://www.fisip.undip.ac.id>.

Literatur keempat yang menjadi tinjauan peneliti adalah artikel karya Yossapon Jirawut tahun 2017 dengan judul “*Anti-trafficking Trough Reporting: The Case of The TIP Report and Thailand*”²⁶. Artikel ini membahas mengenai bagaimana pengaruh laporan TIP (*Trafficking in Persons*) yang merupakan laporan publikasi tahunan milik pemerintah AS dengan menyertakan Tier dan usaha-usaha negara di dunia dalam penanganan perdagangan manusia di negaranya. Artikel ini berpendapat bahwa laporan tersebut berperan penting bagi negara Thailand dalam menentukan kebijakan yang akan mereka buat dalam menangani kasus perdagangan manusia di negaranya. Hal ini mempengaruhi bagaimana kualitas kinerja pemerintah setempat dan berpengaruh buruk pada perekonomian dalam negeri mereka yang mana mencakup kepercayaan pihak luar terhadap sistem perdagangan domestiknya. Perbedaan artikel ini dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah terletak pada penelitian penulis yang berfokus pada peran yang diberikan Amerika Serikat melalui HSI dan FBI dalam menangani perdagangan manusia Thailand, sedangkan artikel tersebut berfokus pada pengaruh program laporan TIP oleh pemerintah AS terhadap kebijakan dalam negeri permasalahan perdagangan manusia di Thailand.

Literatur kelima ialah artikel karya Natalia Sihotang dan Channarong Wiriya tahun 2021 yang berjudul “*Human Trafficking in Thailand in Perspective of Human Rights Law*”²⁷. Pembahasan dalam artikel ini ialah mengenai faktor terjadinya perdagangan manusia di Thailand, keterkaitannya sebagai perbudakan modern pada masa kini, terlibatnya anak-anak dalam perbudakan serta

²⁶ Jirawut, “Anti-Trafficking Trough Reporting: The Case of The TIP Report and Thailand.”

²⁷ Sihotang and Wiriya, “Human Trafficking in Thailand in Perspective of Human Rights Law.”

perdagangan manusia dan pembahasan mengenai hukum-hukum internasional yang menyangkut perdagangan manusia dan perbudakan. Perbedaan artikel ini dengan penelitian penulis ialah peneliti lebih berfokus pada cara Thailand menangani perdagangan manusia di negaranya, sedangkan artikel tersebut berfokus pada bagaimana perdagangan manusia dan perbudakan manusia di Thailand dilihat dalam Hak Asasi Manusia.

Literatur keenam yang menjadi acuan peneliti ialah artikel karya Shelby Stephens tahun 2017 dengan judul "*Show, Don't Tell: How Thailand Can and Must Make Advancements in the Fight Against Human Trafficking in the Thai Fishing Industry*"²⁸. Artikel ini berisi bagaimana permasalahan perdagangan manusia di Thailand bisa terjadi yang terfokus dalam industri perikananannya. Bagaimana hukum domestik yang telah ada belum sepenuhnya efektif ditegakkan disebabkan oleh aparat penegakan hukumnya. Artikel ini juga menjabarkan bagaimana tindakan global dalam memerangi perdagangan manusia di Thailand seperti menempatkan Thailand pada *Tier 3* TIP oleh Amerika Serikat dan kartu kuning yang diberikan oleh EU. Selain itu, juga diberikan rekomendasi bagaimana mengatasi perdagangan manusia pada industri perikananannya untuk masa yang akan datang. Perbedaan artikel ini dengan penelitian penulis adalah peneliti tidak berfokus pada kasus perdagangan manusia di ranah industri perikanan di Thailand. Selain itu, peneliti juga berfokus pada peran yang diberikan AS pada masalah perdagangan manusia di

²⁸ Shelby Stephens, "Show, Don't Tell: How Thailand Can and Must Make Advancements in the Fight Against Human Trafficking in the Thai Fishing Industry," *Emory International Law Review* 31, no. 3 (2017): 479–501.

sektor dari mulai pemerintahan, provinsinya hingga organisasi-organisasi non-pemerintah untuk saling bertukar informasi mengenai adanya kasus perdagangan manusia di wilayah tersebut untuk selanjutnya diselesaikan sesuai dengan tugas masing-masing pihak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah terletak pada pembahasan peneliti yang tidak terfokus pada salah satu wilayah saja di negara Thailand. Selain itu, peneliti juga memasukkan peran pihak luar negeri yakni Amerika Serikat dalam penanganan perdagangan manusia dalam negeri.

Literatur kesembilan ialah tesis karya Timesha A. Smith tahun 2019 dengan judul "*Trafficking in Thailand: An Analysis of Non-Government Organizations' Role*"³¹. Tesis ini memiliki tujuan dalam mendefinisikan apa itu perdagangan manusia dan bagaimana pemeringkatan yang diperoleh oleh Thailand dari tahun ke tahun dalam laporan *Trafficking in Persons* yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Selain itu, juga dijabarkan bagaimana perdagangan manusia khususnya perdagangan seks bisa berkembang begitu masifnya di Thailand dan bagaimana peran yang diberikan oleh NGO yang berada di Thailand dalam tujuannya yang ikut memerangi perdagangan manusia di negara tersebut. Perbedaan tesis ini dengan penelitian peneliti adalah peneliti berfokus pada beberapa keterlibatan Amerika Serikat dalam menangani perdagangan manusia dalam negeri Thailand, sedangkan tesis tersebut berfokus pada peran NGOs disertai peran Lembaga lainnya. Selain itu, peneliti juga tidak berfokus pada prostitusi dalam perdagangan manusia di Thailand.

³¹ Timesha A Smith, "Trafficking In Thailand: An Analysis of Non-Government Organization' Role" (Texas State University, 2019).

Literatur kesepuluh yang menjadi acuan peneliti ialah artikel karya Elena Shih tahun 2017 yang berjudul “*Freedom Markets: Consumption and Commerce across Human-Trafficking Rescue in Thailand*”³². Artikel ini bertujuan dalam membahas latar belakang pentingnya negara Thailand sebagai tujuan dalam penyelenggaraan proyek perdagangan manusia yang dilakukan oleh perusahaan *nonprofit anti-trafficking* Amerika Serikat *Not For Sale* (NFS) dengan melihat upaya anti kejahatan transnasional ini dari sejarah politik dan ekonomi yang dimiliki Thailand. Selain itu, artikel ini juga membahas secara mendetail mengenai keberadaan salah satu pariwisata Thailand yakni tur realitas perdagangan manusia dimana dijalani sendiri oleh sang peneliti. Meskipun memiliki fokus yang sama yakni melihat latar belakang keberadaan perdagangan manusia yang ada di negara Thailand, namun peneliti juga akan memasukkan sejarah sosial yang melatarbelakangi masifnya kasus perdagangan manusia di Thailand. Selain itu, peneliti juga berfokus pada lembaga yang ikut berperan dalam menangani perdagangan manusia di Thailand yakni TICAC dan TATIP, dan juga keterlibatan sebuah negara yang masih berperan penting dalam panggung internasional yakni Amerika Serikat. Peneliti juga tidak akan berfokus pada pembahasan mengenai pariwisata seks di Thailand.

F. Argumentasi Utama

Peneliti memiliki argumen bahwa optimalisasi *Thailand Anti-Trafficking in Persons Task Force* (TATIP) dan *Thailand Internet Crimes Against Children Task Force* (TICAC) untuk Menangani *Human Trafficking* di Thailand tersebut

³² Elena Shih, “Freedom Markets: Consumption and Commerce across Human-Trafficking Rescue in Thailand,” *Positions* 25, no. 4 (2017): 769–94, <https://doi.org/10.1215/10679847-4188410>.

dengan cara peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand dan juga terdapat keterlibatan peran dari Pemerintah Amerika Serikat melalui *Federation Bureau Investigation* (FBI) dan *Homeland Security Investigations* (HSI). Pemerintah Amerika Serikat melalui *U.S. Agency for International Development* (USAID) berperan sebagai negara pemberi bantuan (*foreign aid*) kepada Thailand.

G. Sistematika Penyajian Skripsi

Dalam memberikan konsep mengenai penulisan skripsi hubungan internasional ini dengan judul Peran Amerika Serikat dalam Optimalisasi *Thailand Anti-Trafficking in Persons Task Force* (TATIP) dan *Thailand Internet Crimes Against Children Task Force* (TICAC) untuk Menangani *Human Trafficking* di Thailand tahun 2018-2021, maka penulis akan memberikan sistematika penulisan yang terdiri dari:

1. BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual, penelitian terdahulu serta sistematika pembahasan. Di bagian ini diberikan konsep tentang inti permasalahan yang dipilih di dalam penelitian yang dapat memberikan informasi secara singkat serta mengajak untuk membaca secara lebih lanjut kepada pembaca menuju bagian pokok permasalahan dalam penelitian ini.

2. BAB II Kerangka Konseptual

Pada bagian ini memuat mengenai kerangka konseptual yang digunakan oleh peneliti sehingga memberikan kejelasan mengenai konsep

yang digunakan oleh peneliti dalam menjadikannya acuan untuk menganalisis peristiwa yang terjadi berdasarkan data yang berhasil ditemukan. Disini konsep yang dipakai oleh peneliti ialah peran, implementasi, *counter human trafficking*, *capacity building* dan *foreign aid diplomacy*.

3. BAB III Metode Penelitian

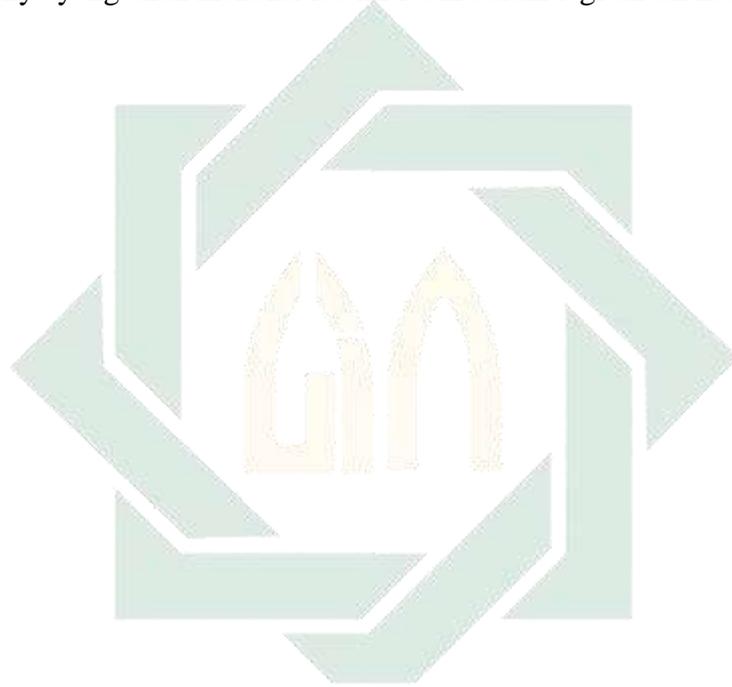
Pada bab ini membahas bagian metode penelitian yang telah digunakan oleh peneliti, yang di antaranya mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan level analisis, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik pemeriksaan keabsahan data.

4. BAB IV Pembahasan

Pada bab IV berisi penyajian data yang peneliti temukan saat penelitian berlangsung, pemaparan data, analisis data, serta mengaitkan data dengan konsep yang tertuang pada kerangka konseptual. Pada bab iv ini, pertama, peneliti memaparkan bagaimana peran AS dalam optimalisasi TATIP untuk menangani perdagangan manusia di Thailand dikarenakan TATIP tidak memiliki spesifikasi dalam penanganan perdagangan manusia. Selanjutnya, peneliti memaparkan bagaimana peran AS dalam optimalisasi TICAC untuk menangani perdagangan manusia Thailand dikarenakan TICAC memiliki kekhususan dalam menangani perdagangan manusia yakni dalam hal eksploitasi anak secara online.

5. BAB V Penutup

Pada bagian terakhir dari penulisan penelitian ini, memuat kesimpulan dari seluruh penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan menjawab rumusan masalah yang ada. Peneliti juga mengharapkan terdapat peneliti selanjutnya yang akan meneliti isu ini lebih dalam lagi untuk kedepannya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL

Definisi konseptual merupakan suatu cara dalam penyampaian kata-kata dengan jelas serta tepat mengenai suatu konsep yang akan diamati dalam penelitian dengan tujuan dapat memberitahukan arti dari konsep tersebut sehingga mudah untuk dipahami.³³ Definisi konseptual pada penelitian ini di antaranya ialah:

A. Role (Peran)

Berdasarkan KBBI, peran didefinisikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Menurut Biddle, pemikiran yang paling umum dalam teori peran ialah diasosiasikan dengan posisi ataupun status sosial.³⁴ Menurut Riyadi sebagaimana dikutip oleh Syaron, peran bisa didefinisikan sebagai orientasi maupun konsep yang dijalankan oleh suatu aktor dalam oposisi sosial. Dengan perannya, baik aktor individu maupun organisasi beretika sesuai dengan harapan orang atau lingkungan.³⁵ Menurut Biddle, peran menyangkut salah satu karakteristik terpenting dari perilaku sosial, yaitu adanya fakta manusia berperilaku dengan cara yang berbeda dan dapat diprediksi tergantung pada identitas sosial masing-masing dan situasinya.³⁶

³³ Rina Hayati, "Pengertian Definisi Konseptual, Tujuan, Manfaat, Dan Contohnya," accessed October 3, 2022, <https://penelitianilmiah.com/definisi-konseptual/>.

³⁴ Bruce J Biddle, *Role Theory* (London: Academic Press, 1979).

³⁵ Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, and Joorie M Ruru, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 04, no. 048 (2002): 2.

³⁶ B. J. Biddle, "Recent Developments in Role Theory," *Annual Review* 12 (1986): 68.

Beberapa pemerintah berpendapat bahwa mereka memiliki kewajiban untuk mengorganisir atau memimpin berbagai jenis gerakan revolusioner di luar negeri.

2. *Regional leader*

Konsepsi peran nasional ini merujuk pada tugas atau tanggung jawab khusus pemerintah untuk dirinya sendiri yang berhubungan dengan negara-negara di wilayah tertentu yang diidentifikasinya, atau pada subsistem lintas sektoral seperti gerakan komunis internasional.

3. *Regional protector*

Konsepsi peran ini menyiratkan tanggung jawab kepemimpinan khusus berdasarkan wilayah atau wilayah masalah dan berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi wilayah yang berdekatan.

4. *Active Independent*

Konsep peran ini menekankan kemerdekaan, penentuan nasib sendiri, kemungkinan fungsi mediasi, dan program aktif untuk memperluas hubungan diplomatik dan komersial ke berbagai wilayah di dunia.

5. *Liberation supporter*

Pada konsep ini memiliki kemiripan dengan *Bastion of revolution-liberator*. Namun, disaat sebagian besar pernyataan yang mendukung gerakan pembebasan tampak rutin dan formal, pendukung kebebasan memiliki sikap yang agak tidak terstruktur

dan tidak jelas tentang tindakan yang diperlukan untuk memberlakukan konsepsi perannya.

6. *Anti-imperialist agent*

Pada konsep ini, pemerintah pada suatu negara yang tidak hanya menganut partai komunis, bertindak sebagai agen "perjuangan" melawan imperialisme yang dianggap sebagai kejahatan dengan ancaman serius.

7. *Defender of the faith*

Beberapa pemerintah melihat tujuan dan komitmen kebijakan luar negeri mereka dalam mempertahankan sistem nilai negara dari serangan. Mereka yang mendukung konsepsi peran nasional ini seperti mengemban tanggung jawab khusus dalam menjamin kemurnian ideologi bagi sekelompok negara lain.

8. *Mediator-integrator*

Pada konsep peran ini, sejumlah besar pemerintah menganggap bahwa mereka mampu atau bertanggung jawab untuk memenuhi atau menjalankan tugas khusus untuk mendamaikan konflik antara negara bagian atau kelompok negara lain.

9. *Regional-subsystem collaborator*

Pada konsep ini, tidak hanya membayangkan bagaimana jika posisi mereka dalam suatu konflik, namun mereka juga menunjukkan komitmen yang luas untuk upaya kerja sama dengan negara lain

untuk membangun komunitas yang lebih luas, atau untuk subsistem lintas sektoral seperti gerakan Komunis.

10. *Developer*

Tema-tema dalam konsepsi peran nasional ini menunjukkan tugas atau kewajiban khusus untuk membantu negara-negara terbelakang.

11. *Bridge*

Konsepsi peran nasional ini seringkali muncul dalam bentuk yang samar-samar, dan meskipun terdapat kebijakan yang berasal darinya, namun kebijakan tersebut tidak tampak jelas. Konsep ini menyiratkan fungsi komunikasi, yaitu bertindak sebagai "penerjemah" atau penyampai pesan dan informasi antara orang-orang dari budaya yang berbeda.

12. *Faithful ally*

Bagi banyak negara, aliansi berpotensi berguna untuk tujuan perlindungan, tetapi negara yang menerima jaminan eksternal tidak membalas dengan mendukung penjamin. Konsepsi peran sekutu yang setia digunakan, hanya jika pemerintah membuat komitmen khusus untuk mendukung kebijakan pemerintah lainnya.

13. *Independent*

Sebagian besar pernyataan yang menegaskan komitmen pada kebijakan *non-alignment* menunjukkan bahwa pemerintah akan membuat keputusan kebijakan sesuai dengan kepentingan negara sendiri daripada mendukung tujuan negara lain.

14. *Example*

Konsepsi peran nasional ini menekankan pentingnya mengangkat prestise dan mendapatkan pengaruh dalam sistem internasional dengan mengejar kebijakan domestik tertentu. Konsepsi peran ditempatkan pada posisi yang rendah pada dimensi pasifitas-aktivitas karena tidak memerlukan program diplomasi formal atau tugas khusus di luar batas negara yang bersangkutan.

15. *Internal Development*

Konsep ini menekankan bahwa sebagian besar upaya pemerintah harus diarahkan pada masalah pembangunan internal. Ada usulan untuk tetap tidak terlibat dalam masalah politik internasional, namun pernyataan tersebut tidak menghalangi berbagai bentuk kerjasama internasional, khususnya dalam hal ekonomi dan teknis.

16. *Isolate*

Konsepsi peran ini berbeda dengan konsep pembangunan internal sebelumnya yang seringkali mencakup referensi untuk kerja sama eksternal, khususnya di bidang ekonomi dan budaya. Peran nasional dari isolasi menuntut kontak eksternal minimum dari varietas apa pun.

17. *Protectee*

Beberapa pemerintah menyinggung tanggung jawab negara lain untuk membela mereka, tetapi sebaliknya tidak menunjukkan orientasi, tugas, atau fungsi tertentu terhadap lingkungan eksternal.

Komentar-komentar itu mungkin lebih merujuk pada posisi negara daripada peran.

Berdasarkan tujuh belas konsepsi peran nasional tersebut, peneliti menggunakan salah satu peran dari K.J Holsti yakni *regional protector* dalam melihat bagaimana keterlibatan AS yang ingin membantu melindungi negara Thailand dari masalah perdagangan manusia dengan cara melakukan optimalisasi pengembangan Lembaga TATIP dan TICAC.

B. *Optimization* (Optimalisasi)

Optimalisasi berasal dari kata ‘optimal’ yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti terbaik atau tertinggi. Kata pengoptimalan berarti proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (mengoptimalkan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya).³⁹

Optimalisasi dapat diartikan sebagai upaya atau cara terbaik yang dipilih untuk dilakukan dalam suatu proses demi mendapatkan hasil yang sesuai dalam mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

Optimalisasi adalah proses menemukan solusi terbaik. Tidak selalu memaksimalkan keuntungan ketika tujuan optimalisasi adalah memaksimalkan keuntungan. Dan juga bukanlah selalu meminimalkan pengurangan biaya ketika tujuan peningkatan efisiensi adalah pengurangan biaya. Dalam proses optimalisasi ada tiga elemen masalah yang perlu diperhatikan: pertama, tujuan dapat berupa peningkatan atau

³⁹ KBBI, “Pengoptimalan,” accessed July 16, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengoptimalan>.

penurunan; kedua, ada alternatif pilihan sebelum tersedia banyak alternatif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga, sumber daya yang terbatas membutuhkan proses optimalisasi.⁴⁰

Optimalisasi adalah upaya untuk meningkatkan kinerja suatu instansi atau individu untuk kepentingan bersama. Agar memperoleh kepuasan dan keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan tersebut Menurut Winardi yang dikutip oleh Bayu, optimalisasi adalah ukuran yang mencapai tujuan. Jika dilihat dari segi bisnis optimalisasi adalah upaya memaksimalkan kegiatan untuk mencapai keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.⁴¹

Dalam penelitian ini, penulis meneliti optimalisasi pada badan atau lembaga yang berada di bawah naungan Polisi Kerajaan Thailand untuk menangani kasus perdagangan manusia yakni *Thailand Anti-Trafficking in Persons Task Force (TATIP)* dan *Thailand Internet Crimes Against Children Task Force (TICAC)*. Optimalisasi tersebut dapat dilakukan setelah adanya pencapaian positif dan kinerja baik yang dihasilkan oleh TATIP dan TICAC. Dalam pengoptimalan, tujuan yang ingin dicapai ialah peningkatan kapasitas penegak hukum untuk menanggulangi perdagangan manusia. Peningkatan kapasitas tersebut dilakukan setelah beberapa kebijakan yang digalakkan belum

⁴⁰ Resma Akbar Arifin, "OPTIMALISASI BARANG MILIK NEGARA," Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-batam/baca-artikel/15142/OPTIMALISASI-BARANG-MILIK-NEGARA.html>.

⁴¹ N. Bayu, "Optimalisasi Pelayanan E-Ktp Guna Meningkatkan Validitas Data Kependudukan Di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang," *Jurnal Kajian Administrasi Dan Pemerintahan Daerah* 10, no. 6 (2017): 99–100.

sepenuhnya efektif dalam memerangi kasus tersebut. Selain itu, dikarenakan tugas Polisi Kerajaan Thailand yang tidak hanya mengatasi kasus perdagangan manusia, maka diperlukan satuan kerja lain yang dapat membantu dengan insentif dan efektif untuk permasalahan kasus perdagangan manusia seperti halnya TATIP dan TICAC.

C. *Countering Human Trafficking* (Penanganan Perdagangan Manusia)

Berdasarkan Pasal 3 dari Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak-anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir, Perdagangan manusia dapat diterjemahkan sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, pengadaan atau penerimaan orang melalui paksaan atau bentuk kekerasan maupun lainnya, penipuan, penculikan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan ataupun memberi atau menerima uang atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang mengendalikan orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi, sekurang-kurangnya, eksploitasi melacurkan orang lain atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan maupun praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.⁴²

⁴² United Nations, "Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime | OHCHR," United Nations, 2000, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-prevent-suppress-and-punish-trafficking-persons>.

Sejak tahun 1904, masyarakat internasional telah menggunakan faktor eksploitasi sebagai kriteria inklusi atau eksklusivitas dalam pemberian status korban kepada korban perdagangan manusia. Pelacuran paksa, kerja paksa non-seksual dan perdagangan organ manusia telah diidentifikasi sebagai parameter eksploitasi yang termasuk dalam perjanjian perdagangan manusia internasional. Sementara prostitusi mengalami perkembangan linier dalam evolusi pendefinisian perdagangan manusia, kerja paksa non-seksual dan perdagangan organ tubuh manusia menjadi isu yang lebih bermasalah bagi komunitas internasional dalam pendefinisian perdagangan manusia.⁴³

Masalah pendefinisian tersebut tertuang pada Konvensi Anti-Perdagangan Manusia 1910 yang terbatas hanya membahas perdagangan manusia untuk tujuan prostitusi yang peraturannya berfokus pada pencegahan perempuan (dewasa dan non-dewasa) dari kehidupan asusila dalam mencegah prostitusi, khususnya prostitusi paksa. Selain itu, Konvensi Anti Perdagangan Manusia 1921, Konvensi Anti Perdagangan Manusia 1933 dan Konvensi Anti Perdagangan Manusia 1949 juga khusus membahas prostitusi. Protokol Anti Perdagangan Manusia PBB tahun 2000 mengenai perdagangan manusia merupakan sebuah pembaharuan dengan tidak terbatasnya bahasan hanya pada eksploitasi seksual saja, melainkan juga perdagangan manusia jenis lainnya.

⁴³ Christal Morehouse, *Combating Human Trafficking: Policy Gaps and Hidden Political Agendas in the USA and Germany*, *Combating Human Trafficking: Policy Gaps and Hidden Political Agendas in the USA and Germany*, 2009, <https://doi.org/10.1007/978-3-531-91524-1>.

Kerja paksa non-seksual sebagai bentuk perdagangan manusia sama sekali tidak ada dalam hukum internasional hingga tahun 2000. Protokol PBB tahun 2000 adalah yang pertama mendefinisikan perdagangan manusia sebagai mencakup kerja paksa non-seksual selain bentuk-bentuk seksual. Perkembangan terakhir yang serupa dalam definisi perdagangan manusia di tingkat internasional menyangkut dimasukkannya perdagangan organ manusia sebagai bentuk perdagangan manusia. Baru pada tahun 2000, masyarakat internasional sampai pada kesimpulan bahwa perdagangan organ manusia adalah salah satu bentuk perdagangan manusia.⁴⁴

Salah satu dari banyak alasan meningkatnya perdagangan manusia adalah dampak dari adanya globalisasi. Mudahnya akses yang diperoleh menuju negara lain menjadi alasan kuat masalah tersebut terjadi. Akan tetapi, mobilitas yang lebih besar tidak hanya berlaku untuk orang yang diselundupkan dan diperdagangkan. Salah satu area pertumbuhan utama dalam perjalanan internasional dalam beberapa tahun terakhir adalah pariwisata seks. Wisata seks dari negara-negara Barat yang makmur ke negara-negara seperti Kamboja dan Thailand telah memainkan peran utama dalam meningkatkan prostitusi dewasa dan anak.⁴⁵ Melihat peta negara Thailand yang strategis bagi negara-negara miskin sekitarnya untuk tujuan migrasi, hal ini tentunya menjadi

⁴⁴ Morehouse.

⁴⁵ Leslie Holmes, *Trafficking and Human Rights*, ed. Leslie Holmes (United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited, 2010).

keuntungan sendiri bagi para pelaku perdagangan manusia dalam melaksanakan kejahatannya.

Faktor kedua adalah teknologi yang lebih besar penggunaannya untuk iklan (dan untuk mencuci hasil perdagangan). Organisasi kriminal telah sangat berhasil dalam menggunakan internet untuk memikat orang yang mudah tertipu dan/atau putus asa dengan dokumen yang harus mereka penuhi demi penghidupan yang lebih layak. Iklan mengenai pekerjaan dengan kualifikasi yang mudah dipenuhi atau bahkan tanpa kualifikasi, sangat menarik bagi orang-orang yang mudah tertipu dan putus asa. Mereka kemudian dieksploitasi oleh operator yang tidak bermoral.⁴⁶ Penggunaan media internet yang sulit untuk ditelusuri modus kejahatannya dikarenakan iklan yang menipu tentang pekerjaan dapat menjadi faktor pelik berkembangnya perdagangan manusia.

Ketiga, semua indikator yang seringkali subjektif yang tersedia, menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan substansial dalam korupsi yang menjadi salah satu bidang paling menguntungkan bagi pejabat korup untuk berkolusi dengan geng kejahatan dalam penyelundupan manusia dan perdagangan manusia. Faktor keempat adalah maraknya perang saudara dan internasional akhir-akhir ini, yang telah bertindak sebagai faktor 'pendorong' utama bagi orang-orang yang mencoba melarikan diri dari tanah mereka yang bermasalah. Sejumlah faktor budaya juga berkontribusi pada permintaan akan pelacur dan keinginan

⁴⁶ Holmes.

perempuan untuk melarikan diri dari kampung halaman mereka diakibatkan ketidaksetaraan gender yang merupakan masalah serius di banyak negara berkembang dan beberapa negara transisi, dan menjadi sasaran untuk dimainkan oleh para pedagang manusia.⁴⁷

Menurut Konrad yang telah dikutip oleh Nembhard, terdapat empat jenis tindakan yang dapat dilakukan dalam memerangi perdagangan manusia yang disebut sebagai 4P.⁴⁸

1. Pencegahan

Pencegahan melibatkan kampanye media untuk mendidik masyarakat. Iklan dapat ditargetkan pada segmen yang rentan untuk mewaspadaikan calon korban akan bahaya perdagangan manusia atau dapat ditujukan untuk memungkinkan orang lain mengenali dan melaporkan kemungkinan situasi perdagangan manusia kepada pihak berwenang. Meskipun media sosial telah berperan besar dalam memfasilitasi jaringan terlarang, meningkatkan kesadaran adalah salah satu cara di mana media sosial dapat digunakan untuk menyoroti masalah ini.

2. Perlindungan

Perlindungan mengacu pada mengenali kemungkinan korban, melarang jaringan perdagangan manusia, dan menyediakan tempat berlindung bagi korban yang diselamatkan.

⁴⁷ Holmes.

⁴⁸ Maria Mayorga et al., "Contering Human Trafficking Using ISE/OR Techniques," in *Emerging Frontiers in Industrial and Systems Engineering: Success Through Collaboration*, ed. Harriet Nembhard, Elizabeth Cudney, and Katherine Coperich (New York: CRC Press, 2019), 238–39.

melalui media massa yang bertugas sebagai sarana dalam mendistribusikan berbagai informasi yang menyangkut tentang bagaimana cara melawan perdagangan manusia.

Konstruksi penanggulangan perdagangan manusia di tingkat negara-bangsa berarti pembahasannya sebagian besar terdiri dari aktor-aktor berbasis nasional dan relasi mereka yang menghasilkan wacana, kebijakan, dan tindakan untuk melawan perdagangan manusia di tingkat global. Bidang penanggulangan perdagangan manusia nasional saling bersinggungan dengan bidang nasional lainnya dan bidang penanggulangan perdagangan manusia transnasional. Hal ini berarti terdapat kemungkinan adanya bentuk tindakan lintas batas negara, seperti departemen khusus atau tim polisi nasional yang dapat bertindak untuk menangkap para pedagang dan orang yang diperdagangkan di negara mereka dan juga dapat bekerja sama dengan lembaga kepolisian nasional lainnya serta Interpol dalam melakukan operasi internasional.⁵⁰

Selama dekade terakhir, di mana studi tentang perdagangan manusia berkembang dan satu per satu negara-bangsa dan organisasi internasional mulai untuk menindak permasalahan tersebut, pertamanya negara-negara diklasifikasikan menurut posisinya dalam kaitannya dengan fenomena perdagangan manusia di negaranya. Klasifikasi tersebut disesuaikan sebagai negara asal, negara transisi, dan negara tujuan perdagangan manusia. Laporan *Trafficking in Persons (TIP)*

⁵⁰ Atasu-Topcuoglu.

pemerintah AS berdampak kuat pada produksi dan penyebaran klasifikasi ini.

D. *Capacity Building* (Peningkatan Kapasitas)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peningkatan berarti proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dan sebagainya). Sedangkan kapasitas merupakan kemampuan atau kecakapan dalam melakukan sesuatu.⁵¹ Pembangunan kapasitas (*Capacity Building*) didefinisikan sebagai proses pengembangan dan penguatan keterampilan, naluri, kemampuan, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan organisasi dan komunitas untuk bertahan, beradaptasi, dan berkembang di dunia yang cepat berubah.⁵² Menurut Plummer, istilah ‘peningkatan kapasitas’ mencakup pengertian kapasitas yang lebih luas yang mencakup pengembangan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan kerangka regulasi.⁵³ Pengertian ini tidak begitu berbeda dengan menurut Brown, LaFond dan Macintyre, yang mengartikan pengembangan kapasitas sebagai proses yang meningkatkan kemampuan seseorang, kelompok, organisasi, atau sistem untuk memenuhi tujuannya atau untuk berkinerja lebih baik.⁵⁴

⁵¹ KBBI, “Kapasitas,” accessed July 17, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kapasitas>.

⁵² United Nations, “Capacity-Building,” accessed July 17, 2023, <https://www.un.org/en/academic-impact/capacity-building>.

⁵³ Janelle Plummer, *FOCUSING PARTNERSHIPS: A Sourcebook for Municipal Capacity Building in Public-Private Partnerships* (United States of America: Earthscan Publication Ltd, 2013), <https://doi.org/10.4324/9781849771368>.

⁵⁴ Lianne Brown et al., “Evaluation Capacity Development: Oed Self-Evaluation,” *Public Health Nutrition* 35, no. 3 (2004): 11, www.worldbank.org.oed/ecd%0Awww.cpc.unc.edu/measure.

Menurut McKnight yang dikutip oleh Miller, peningkatan kapasitas ialah membangun dari dalam ke luar, menekankan pada pembangunan konsensus, mempertahankan jaringan dan hubungan yang banyak dan beragam, mengidentifikasi dan merayakan kekuatan dan aset komunitas, menghasilkan keterlibatan komunitas berbasis luas untuk keuntungan bersama, mengembangkan seluruh komunitas visi untuk masa depan dan mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk mewujudkan visi tersebut.⁵⁵

Mekanisme yang semakin penting untuk peningkatan kapasitas adalah intervensi yang memungkinkan para profesional untuk bekerja berdampingan satu sama lain secara setara. Intervensi tersebut termasuk pengaturan dan jaringan kembar, serta lokakarya, seminar dan platform untuk kerjasama internasional yang memfasilitasi berbagi pengetahuan. Oleh karena itu, banyak program peningkatan kapasitas menyertakan beberapa bentuk keterikatan pada badan air dan usaha sehingga para peserta dapat memiliki pengalaman langsung tentang praktik yang baik dalam situasi yang berbeda. Pendekatan seperti ini semakin banyak diadopsi dalam program pelatihan di luar negeri, dan terkadang memiliki hasil yang menarik baik bagi pelatih maupun peserta pelatihan.⁵⁶

⁵⁵ Sue Kenny and Matthew Clarke, *Challenging Capacity Building Comparative Perspectives* (London: Palgrave Macmillan, 2010).

⁵⁶ Tom Franks, "Capacity Building and Institutional Development: Reflections on Water," *Public Administration and Development* 19, no. 1 (1999): 53–54, [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-162X\(199902\)19:1<51::AID-PAD54>3.0.CO;2-N](https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-162X(199902)19:1<51::AID-PAD54>3.0.CO;2-N).

Dalam konteks sistem yang lebih luas, *capacity building* terdiri dari tiga level kapasitas yang terdiri dari:⁵⁷

1. Kapasitas di Tingkat Individu

Kapasitas pada tingkat individu merupakan elemen kapasitas yang paling mendasar dan menjadi dasar untuk kapasitas organisasi yang mengacu pada kemauan dan kemampuan individu untuk menetapkan tujuan dan mencapainya dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan sendiri. Kapasitas ini meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap, kesehatan, kesadaran, dll. Dalam konteks pengembangan organisasi disebut juga pengembangan sumber daya manusia.

2. Kapasitas di Tingkat Organisasi

Kapasitas di tingkat organisasi akan menentukan bagaimana kapasitas individu dimanfaatkan dan diperkuat. Ini mengacu pada segala sesuatu yang akan mempengaruhi kinerja organisasi dan meliputi: sumber daya manusia (kapasitas individu dalam organisasi); sumber daya fisik (fasilitas, peralatan, bahan, dll); sumber daya intelektual (strategi organisasi, perencanaan strategis, manajemen pengetahuan bisnis, teknologi produksi, manajemen program, manajemen proses (misalnya, keterampilan memecahkan masalah, proses pengambilan keputusan, komunikasi, dll.);

⁵⁷ Atsushi Matachi, *Capacity Building Framework, UNESCO - International Institute for Capacity Building in Africa* (Addis Ababa, 2006).

terjadi sebagai respons terhadap bencana alam, di mana pasokan darurat seperti pertolongan pertama, air, makanan, dan pakaian dikirim ke negara yang membutuhkan. Organisasi juga dapat mengirimkan layanan seperti sukarelawan layanan kesehatan untuk membantu upaya pemulihan.⁶⁵

2. Bantuan Militer

Bantuan militer adalah segala jenis bantuan yang diberikan untuk memperkuat langkah-langkah keamanan di suatu negara.⁶⁶ Contoh dari bantuan ini ialah ketika suatu negara pemberi bantuan mengharuskan negara penerima bantuan untuk membeli senjata atau menandatangani kontrak pertahanan langsung dengan negara pemberi bantuan.⁶⁷

3. Bantuan Ekonomi

Bantuan ekonomi adalah kategori umum yang menggambarkan transfer yang mendukung perekonomian negara penerima. Donor dapat berupa negara merdeka atau organisasi internasional yang besar. Bantuan jenis ini dapat berupa pinjaman, hibah atau kredit. Jenis bantuan ekonomi yang paling umum adalah Bantuan Pembangunan Resmi (ODA), di mana uang digunakan untuk pengembangan ekonomi penerima.⁶⁸

⁶⁵ The Borgen Project, "5 Different Types of Foreign Aid," The Borgen Project, 2020, <https://borgenproject.org/5-types-of-foreign-aid/>.

⁶⁶ The Borgen Project.

⁶⁷ Ross, "What Are the Different Types of Foreign Aid?"

⁶⁸ The Borgen Project, "5 Different Types of Foreign Aid."

4. Bantuan Bilateral

Bantuan bilateral diberikan langsung oleh pemerintah satu negara kepada pemerintah negara lain. Hal itu terjadi ketika uang mengalir dari negara dengan ekonomi maju ke negara dengan ekonomi berkembang. Bantuan bilateral diarahkan oleh kepentingan strategis, politik, dan kemanusiaan. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mendorong demokrasi, pertumbuhan ekonomi, perdamaian, dan keberlanjutan program jangka panjang.⁶⁹

5. Bantuan Multilateral

Bantuan multilateral seperti bantuan bilateral, kecuali disediakan oleh banyak pemerintah, bukan satu. Satu organisasi internasional, seperti Bank Dunia, sering mengumpulkan dana dari berbagai negara penyumbang dan melaksanakan pengiriman bantuan.⁷⁰

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶⁹ CFI, "Foreign Aid," Corporate Finance Institute, 2020, <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/economics/foreign-aid/>.

⁷⁰ Ross, "What Are the Different Types of Foreign Aid?"

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diimplementasikan ialah penelitian kualitatif-deskriptif. Metode penelitian kualitatif tidak jarang juga dinamakan penelitian metode naturalistik karena penelitian yang dilakukan saat suasana bersifat alamiah (*natural setting*).⁷¹ Sifat alamiah yang dimaksud dapat diartikan sebagai situasi alamiah partisipan, lingkungan dan juga tempatnya.⁷² Metode ini juga dinamakan metode *artistic* karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut metode *interpretive* karena data yang dihasilkan lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang di temukan di lapangan.⁷³ Jenis penelitian kualitatif ini diambil disebabkan penelitian ini membutuhkan penjelasan yang tidak memerlukan data berupa perhitungan ataupun angka dengan lebih membutuhkan penjelasan berupa kata-kata maupun bahasa. Dengan kata lain, penelitian ini lebih menekankan penjelasan bersifat analisis deskriptif maupun naratif dalam penyajian data-datanya.

B. Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memiliki fokus pada studi literatur sebagai sumber data primer. Data-data yang digunakan ialah data yang berasal dari proses pencarian daring maupun luring melalui media

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung, Jawa Barat, 2014).

⁷² Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*, ed. Arita L (Jakarta: PT Grasindo, 2010).

⁷³ Sandu Siyoto and Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, ed. Ayub, Cetakan 1 (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

digital maupun cetak seperti dokumen resmi kedua negara yakni *Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts* sebagai laporan resmi bagaimana situasi perdagangan manusia di Thailand, *usaid.gov* sebagai situs resmi pemerintah AS dalam memaparkan bantuan keuangan pada negara Thailand, *press release* pada laman resmi kedua negara mengenai penandatanganan perjanjian mengatasi eksploitasi seksual anak *online*, buku, jurnal, artikel, skripsi, dan sumber lain yang sesuai dengan topik yang peneliti pilih. Waktu penelitian yang digunakan ialah pada tahun 2018 hingga 2021. Pemilihan waktu tersebut dikarenakan tahun 2018 menarik minat peneliti mengenai peringkat Thailand yang berubah dari Rangkaian 2 Pengawasan TIP menjadi Rangkaian 2.

C. Subjek Penelitian dan Level Analisis

Dalam penelitian ini, penentuan subjek telah ditentukan oleh peneliti yakni Pemerintah Thailand yang diwakili oleh TATIP dan TICAC. Amerika Serikat berperan sebagai *unit analysis* atau sebagai variabel independen yang juga bisa disebut sebagai variabel hasil yang mana merupakan variabel yang mendukung adanya variabel dependen. Sedangkan variabel dependen atau juga disebut variabel kausal maupun variabel penjelas (unit eksplanansi) disini ialah penanganan perdagangan manusia di Thailand. Pada level Analisis, peneliti menggunakan level analisa negara pada penelitian ini. Level Analisis sendiri berguna untuk membantu peneliti dalam memperjelas penggunaan variabel yang tepat berdasarkan variabel dependen.

D. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini tahap-tahap penelitian yang digunakan terdiri dari:

1. Tahap Mengidentifikasi Masalah

Pada tahap ini, peneliti melakukan studi sederhana dalam menentukan sebuah tema serta topik yang akan dijadikan penelitian untuk skripsi yang berkaitan dengan permasalahan yang ada serta diinginkan untuk dianalisa. Dalam memilih tema penelitian, peneliti memilih tema *human trafficking*.

2. Tahap Tinjauan Pustaka

Pada tahap tinjauan pustaka, peneliti melakukan pengumpulan dan menentukan apa sajakah sumber literatur terkait yang dapat memperdalam pemahaman peneliti dalam masalah penelitian yang akan diimplementasikan dalam menyusun data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Sumber literatur yang digunakan oleh peneliti ialah berasal dari jurnal akademik mengenai tema *human trafficking*, situs resmi pemerintah Thailand dan Amerika Serikat (*Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts, U.S. Department of State*), buku (penelitian kualitatif, *role, optimization, countering human trafficking, capacity building dan foreign aid*), artikel berita (*human trafficking Thailand, TIP reports*), dll.

3. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data-data yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan menggunakan metode dokumentasi melalui situs resmi pemerintah, jurnal, buku, berita, dll. Data-data yang dikumpulkan berupa kebijakan penanganan perdagangan manusia Thailand, peringkat Thailand dalam laporan *Trafficking in Persons* (TIP), dan peran Amerika Serikat dalam penanganan perdagangan manusia di Thailand.

4. Tahap Analisis Data

Pada tahap analisis data, peneliti menganalisis data-data yang telah dikumpulkan setelah dilakukan penyeleksian. Peneliti kemudian menarik pemahaman dari data yang ada untuk kemudian dapat mengembangkan argumentasi utama peneliti dalam menjawab rumusan masalah sesuai dengan fenomena keamanan manusia dan kejahatan terorganisir transnasional yang diteliti.

5. Tahap penulisan kesimpulan

Pada tahap ini merupakan tahap akhir dari penelitian dengan penulisan kesimpulan penelitian berdasarkan penemuan yang didapatkan sebelumnya. Penulisan kesimpulan yang dimaksud ialah mengenai peran Amerika Serikat terhadap penanganan *human trafficking* di Thailand seperti memberikan bantuan melalui USAID dan pengaruh dari bantuan yang diberikan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penelitian kualitatif memperoleh informasi melalui beberapa cara yaitu observasi, wawancara dan dokumen. Menurut Patton yang dikutip oleh Semiawan, Teknik observasi ialah perolehan data berupa gambaran yang ada di lapangan dalam bentuk sikap, tindakan, pembicaraan, interaksi interpersonal dan lain-lain.⁷⁴ Teknik wawancara ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dan suatu topik tertentu.⁷⁵ Teknik yang digunakan peneliti ialah Teknik studi literatur atau Teknik dokumen yang termasuk dalam data Sekunder. Studi literatur digunakan yang memuat data-data resmi dokumen-dokumen seperti artikel dalam jurnal, berita serta penggunaan website-website resmi yang telah terverifikasi baik dalam domain nasional maupun internasional dengan media digital ataupun berbentuk buku. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan ialah dengan melakukan pencarian data pustaka atau yang bisa disebut sebagai *library reserch* dimana dilakukan dengan pencarian data - data yang ada yang mana bersangkutan dengan masalah yang diteliti untuk dilakukan pengumpulan.

F. Teknis Analisis Data

Sugiyono dalam Albi Anggito & Setiawan, memaknai analisis data sebagai proses dalam mencari maupun menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara sistematis

⁷⁴ Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*.

⁷⁵ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Edisi Ke-3 (Depok: PT Grafindo Persada, 2019).

melalui cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkannya dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilah mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁷⁶ Miles dan Huberman dalam Albi Anggito & Setiawan, menjabarkan tiga teknik yang digunakan dalam analisis data, yaitu:

A. Reduksi data

Reduksi data diartikan adanya susunan analisis yang bertujuan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan dan mengelompokkan data dengan berbagai macam cara sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir yang kemudian diverifikasi. Reduksi data juga bisa disebut sebagai proses memilih dan memusatkan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan.⁷⁷

Dalam proses ini, peneliti akan mereduksi data-data yang telah didapatkan. Data tersebut akan disesuaikan dan difokuskan dengan tema yang telah dipilih oleh peneliti. Fokus yang dilakukan oleh peneliti seperti pada korban-korban perdagangan manusia di Thailand setiap tahunnya, peran-peran Amerika Serikat terhadap penanganan *human trafficking* di Thailand, dan dampak dari keterlibatan Amerika Serikat terhadap penanganan perdagangan manusia di Thailand

⁷⁶ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Ella Deffi Lestari, 1st ed. (Sukabumi, Jawa Barat: CV Jejak, 2018). Hal 236-237.

⁷⁷ Anggito and Setiawan. Hal 243-244.

tersebut. Data-data mengenai hal-hal yang tidak berkaitan dengan tema yang dipilih peneliti, tidak akan digunakan agar penelitian yang dilakukan tidak meluas.

B. Penyajian Data

Penyajian data memiliki tujuan untuk menemukan pola-pola yang bermakna juga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta memberikan tindakan.⁷⁸ Penyajian data ini ialah suatu susunan dari organisasi informasi, yang berbentuk deskripsi maupun narasi lengkap, yang penyusunannya didasarkan atas pokok-pokok temuan yang tersedia dalam reduksi data, dan kemudian disajikan menggunakan bahasa peneliti yang logis dan sistematis, sehingga mudah dipahami.⁷⁹ Penyajian data digunakan bagi peneliti agar memudahkan dalam melihat gambaran bagian tertentu penelitian maupun penelitian secara keseluruhan.

Dalam proses ini, peneliti akan menyajikan data yang telah ditemukan ke dalam BAB IV penelitian ini. Data yang akan disajikan berupa sejarah perdagangan manusia di Thailand, grafik pemeringkatan Thailand dalam laporan *Trafficking in Persons* (TIP), langkah Thailand dalam menangani perdagangan manusia di negaranya, peran pemerintah Amerika Serikat dalam membantu menangani perdagangan manusia di Thailand, dan dampak yang

⁷⁸ Anggito and Setiawan. Hal 248.

⁷⁹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014).

ditimbulkan setelah adanya peranan dari Amerika Serikat terhadap perdagangan manusia di Thailand.

C. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

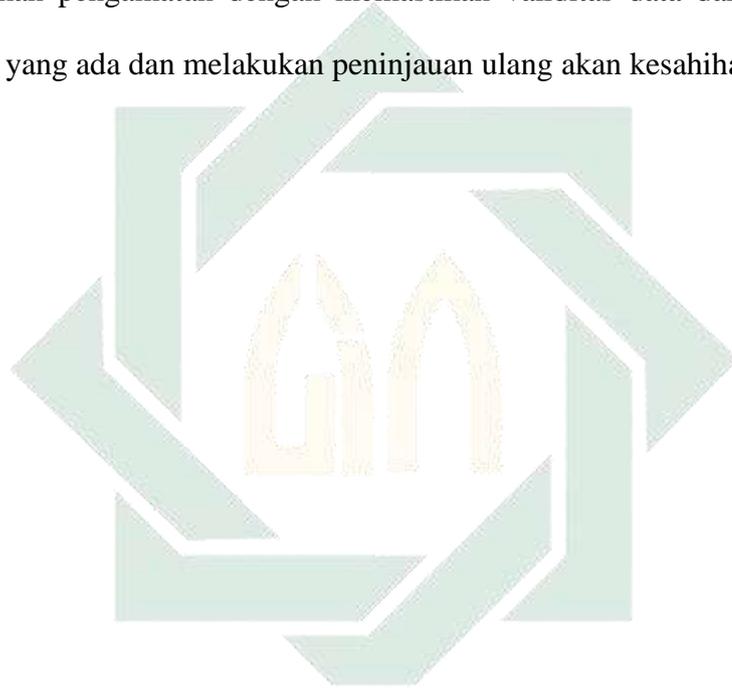
Pada tahap akhir, terdapat penarikan kesimpulan yang merupakan tahap yang penting juga dari teknik analisis data. Penarikan kesimpulan sendiri merupakan tahap dari suatu konfigurasi yang menggambarkan keutuhan suatu penelitian. Proses verifikasi data juga dilakukan secara berkala selama penelitian sedang berlangsung sejak awal peneliti memasuki lokasi penelitian hingga proses pengumpulan data dilakukan. Proses verifikasi dilakukan untuk membuktikan validitas data yang ditemukan agar bersifat objektif dan akurat.

Penarikan kesimpulan akan diimplementasikan peneliti dalam BAB V pada bagian kesimpulan penelitian ini. Penarikan kesimpulan dapat juga digunakan sebagai bukti bahwa peneliti dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan. Peneliti akan mengambil kesimpulan mengenai apakah dampak setelah keterlibatan peranan Amerika Serikat dalam menangani perdagangan manusia di Thailand signifikan dalam mengurangi perdagangan manusia di negara tersebut.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pada Teknik pemeriksaan keabsahan data yang berfungsi sebagai penanggungjawaban akan kebenaran data yang didapat peneliti, peneliti

menggunakan Teknik *credibility* atau yang dapat disebut sebagai taraf kepercayaan. Dalam pengujian data yang dilakukan, peneliti melakukan beberapa proses, diantaranya yaitu kesungguhan dan kecermatan dalam melakukan pengamatan dengan memastikan validitas data dari berbagai sumber yang ada dan melakukan peninjauan ulang akan kesahihannya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Sejarah *Human Trafficking* di Thailand

Negara Thailand merupakan salah satu negara terpopuler untuk perjalanan wisata di Kawasan Asia Tenggara baik dari segi tata letak negaranya yang strategis maupun wisata alam dan wisata sejarahnya yang memukau. Meskipun memiliki sisi positif dalam hal tujuan wisata yang telah disebutkan, Thailand juga tidak asing dengan adanya perdagangan manusia seperti eksploitasi perdagangan seks. Melihat dari sejarah yang tersedia, perdagangan manusia di Thailand sudah ada dari masa kerajaan Ayutthaya (1351-1767).

Selama periode Ayutthaya, prostitusi dilegalkan dan diatur oleh pemerintah. Pekerja seks diminta untuk mendaftar ke otoritas lokal, dan tunduk pada pemeriksaan kesehatan berkala untuk mencegah penyebaran penyakit menular seksual. Pemerintah memungut pajak dari rumah bordil dan pekerja seks, dan industri tersebut dipandang sebagai sumber pendapatan penting bagi negara.⁸⁰ Menurut petugas divisi pariwisata Administrasi Metropolitan Bangkok, Thanat Bhumarush, sebagian besar pekerja seks adalah keturunan bangsawan. Ketika mereka melakukan pelanggaran, seperti korupsi dan pengkhianatan, mereka dijual ke pekerja

⁸⁰ Petrus, "Prostitution in Thailand: History, Legal Status & Societal Impact," [thethailandlife.com](https://www.thethailandlife.com), accessed May 16, 2023, <https://www.thethailandlife.com/prostitution-thailand>.

hukum. Selama periode ini, migrasi tingkat tinggi terjadi karena banyak pekerja seks Tionghoa mulai menyusup ke perbatasan Thailand. Era Ayutthaya menciptakan penindasan sistematis terhadap perempuan di Thailand yang menunjukkan bahwa budaya tidak dapat disangkal terkait dengan penindasan seks.⁸⁴

Perbudakan di Thailand sendiri telah dihapuskan pada era Raja Rama V di tahun 1905. Pada masa pemerintahan Raja Chulalongkorn ini, undang-undang mewajibkan operator dan pekerja seks mendapatkan izin dan rumah bordil harus dijauhkan dari pandangan publik.⁸⁵ Lebih lanjut, Raja Rama V juga mulai menerapkan kebijakan-kebijakan maupun nilai sosial yang diterapkan oleh Barat setelah adanya penguatan hubungan antar negara Barat dengan Thailand. Adanya serangkaian reformasi sosial dan hukum juga dilakukan sebagai jalan untuk memodernisasi negara dan meningkatkan taraf hidup warganya. Salah satu reformasi ini adalah penghapusan prostitusi yang dikendalikan negara. Namun hal tersebut mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan dalam kehidupan mereka setelah poligami dianggap ilegal pada tahun 1930-an dan budaya tersebut banyak ditinggalkan oleh kaum laki-laki. Pada akhirnya, mantan budak memilih prostitusi sebagai jalan akhir dan rumah-rumah bordil banyak bermunculan sehingga Bangkok yang merupakan ibukota Thailand disebut sebagai “bordil Asia”.⁸⁶

⁸⁴ Smith, “Trafficking In Thailand: An Analysis of Non-Government Organization’ Role.”

⁸⁵ Boonlert, “Recalling Bangkok’s Dark Side.”

⁸⁶ Smith, “Trafficking In Thailand: An Analysis of Non-Government Organization’ Role.” Hal 8-10

Anggapan tersebut muncul setelah wisata seks menjadi daya tarik utama Thailand yang membuat ekonominya berkembang meskipun sisi negatifnya juga membuat resah masyarakat. Berdasarkan kutipan Smith dalam Siddarth, tanggung jawab dalam merawat orang tua lanjut usia dibebankan kepada anak-anak dalam budaya tradisional Thailand. Tanggung jawab yang diberikan juga akan diberikan kepada perempuan muda di kawasan negara Asia Tenggara.⁸⁷ Sejalan dengan hal tersebut, menurut Sihotang dan Wiriya, Agama Buddha sebagai agama besar di Thailand juga tampaknya memberikan ruang toleransi terhadap perkembangan perdagangan manusia. Dalam pemahaman Buddhis, perempuan memiliki tanggung jawab lebih untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.⁸⁸

Perkembangan perdagangan manusia melalui faktor agama juga dibenarkan oleh Bales. Dalam jenis Buddhisme yang dianut di Thailand, wanita dianggap lebih rendah dari pria. Di tangga kehidupan, wanita berada jauh di bawah pria. Dalam catatan kata-kata nasihatnya, Buddha memperingatkan murid-muridnya tentang bahaya wanita: mereka tidak murni, duniawi, dan korup. Buddhisme Thailand juga membawa pesan sentral tentang penerimaan dan kepasrahan dalam menghadapi rasa sakit dan penderitaan hidup. Apapun yang terjadi adalah takdir tetap seseorang, karma. Bagi beberapa anak Thailand, kepedihan hidup ini termasuk

⁸⁷ Smith.

⁸⁸ Sihotang and Wiriya, "Human Trafficking in Thailand in Perspective of Human Rights Law." Hal 508-509

prostitusi paksa.⁸⁹ Hal ini tentu menyensasikan anak-anak Buddhis Thailand khususnya perempuan yang harus menjalani hal tersebut sesuai dengan agama maupun tradisi yang mereka anut.

Keyakinan religius akan inferioritas tentu saja bukan satu-satunya aturan budaya yang menekan mereka ke dalam perbudakan. Anak-anak Thailand, terutama anak perempuan, berhutang banyak kepada orang tua mereka, kewajiban baik kosmik maupun fisik. Bagi mereka, dilahirkan ke dunia menjadi anugerah yang luar biasa, diberi makan dan kemudian dibesarkan yang keduanya membutuhkan pembayaran seumur hidup. Anak perempuan di Thailand selalu diharapkan untuk memberikan kontribusi penuh pada pendapatan keluarga mereka dan membayar hutang kewajiban mereka. Dalam kasus ekstrim ini berarti dijual sebagai budak, dikorbankan demi kebaikan keluarga mereka.⁹⁰ Menurut Smith, sulitnya mencari pekerjaan sebab kurangnya kesempatan dan diskriminasi gender yang diberikan, banyak dari mereka yang memilih prostitusi maupun jalan eksploratif lainnya demi menghidupi keluarganya.⁹¹

Kedudukan antara Amerika Serikat pada perang Indochina atau perang Vietnam yang terjadi pada akhir 1960-an hingga 1970-an akhir tidak jarang selalu dikaitkan dan dijadikan sebagai penyebab terciptanya pariwisata seks atau perkembangan wisata seks di Thailand. Menurut Garrick yang dikutip oleh Gugić, selama perang tersebut berlangsung,

⁸⁹ Kevin Bales, *Disposable People: New Slavery in the Global Economy* (California: University of California Press, 1999).

⁹⁰ Bales.

⁹¹ Smith, "Trafficking In Thailand: An Analysis of Non-Government Organization' Role."

personel militer Amerika mencari cara untuk melarikan diri dari kehidupan sehari-hari mereka yang monoton, penuh tekanan dan mengganggu dan melihat cara untuk melarikan diri di Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam dan negara-negara lain di Asia Tenggara dengan menikmati pemandangan wanita Asia yang indah untuk menghilangkan kekhawatiran mereka.⁹²

Menurut Jamil, dkk yang dikutip oleh Gugić, situasi ekonomi yang buruk dan kemiskinan di negara-negara yang telah disebutkan sebelumnya, membuat semakin banyaknya perempuan miskin dalam negeri yang bermigrasi ke kota-kota tersebut untuk menawarkan layanan seksual kepada para prajurit. Saat berakhirnya perang, layanan seks menurun dengan cepat dan negara benar-benar kehilangan aliran pendapatan yang stabil setiap bulan. Sejumlah besar pekerja migran ilegal di Thailand memberi banyak peluang bagi para pelaku perdagangan manusia dengan memaksa mereka untuk bekerja atau melakukan eksploitasi seksual. Perempuan dan anak-anak sebagian besar diperdagangkan dari Burma, Cina, Kamboja, Laos, Uzbekistan, dan Rusia untuk eksploitasi seksual komersial. Di sisi lain, banyak perempuan dan anak-anak dari Burma, Vietnam, dan Kamboja yang transit melalui Thailand ke Malaysia. Perempuan dan anak-anak dari suku pegunungan merupakan penduduk yang dikategorikan paling miskin dari mereka semua dengan ketiadaan hak apapun yang didapat, yang kemudian

⁹² Zrinka Gugić, "Human Trafficking Under the Veil of Sex Tourism in Thailand - Reactions of the Eu.," no. 2 (2014): 355–76, <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=101101846&site=ehost-live>.

diperdagangkan dari negara-negara Asia Tenggara yang miskin ke Kanada, Amerika Serikat, Eropa, Jepang, Rusia, Afrika Selatan, Australia, dan Singapura untuk eksploitasi seksual.⁹³

Pada tahun 1997, Thailand mengalami masalah perekonomian dalam negerinya ketika terjadi krisis keuangan akibat mata uangnya, Bath terdepresi. Pemerintah kemudian melakukan devaluasi drastis terhadap mata uang mereka yang mengakibatkan krisis yang sangat parah di mana banyak lembaga keuangan runtuh atau diambil alih tanpa sumber modal baru. Konstruksi dan usaha ekonomi baru pun melambat hingga hampir berhenti.⁹⁴ Ketika masalah ekonomi tersebut terjadi, tingkat perdagangan juga meningkat dan perempuan dan anak-anak yang rentan terhadap perdagangan manusia menjadi korbannya. Karena ekonomi membentuk suatu negara, tidak mengherankan jika Thailand mengalami kesulitan untuk memutuskan hubungan sepenuhnya dengan perdagangan manusia. Thailand telah mampu memonopoli perdagangan manusia dan ekonomi telah lama diuntungkan dari industri seks.

Menurut Shih yang mengutip *Thai National Economic and Social Development Board*; Wilson; Skrobanek, Boonpakdee, dan Jantateero, setelah krisis keuangan tahun 1997, ekonomi berbasis ekspor Thailand telah direncanakan dan didanai oleh Dana Moneter Internasional dan pinjaman Bank Dunia dengan mengistimewakan ekspor, pariwisata, dan ekspansi

⁹³ Gugić.

⁹⁴ James A., Keyes, Charles F., Keyes, E. Jane and Hafner, "Thailand," Encyclopedia Britannica, accessed April 5, 2023, <https://www.britannica.com/place/Thailand>.

perusahaan terutama di Bangkok untuk mendukung reformasi ekonomi Thailand. Hal ini kemudian telah menciptakan kesenjangan kekayaan yang besar antara Bangkok dan tujuh puluh lima provinsi lainnya di Thailand. Saat ini, sebagian besar kekayaan negara terkonsolidasi di ibu kota negara, dengan 44,3 persen dari PDB tercatat di Bangkok saja. Hasil dari dukungan dana yang diberikan, ekonomi Thailand pun mulai perlahan pulih kembali.⁹⁵

Faktor budaya dan faktor ekonomi menjadi pendorong adanya peningkatan *trafficking* di Thailand. Didasarkan pada sisi budaya, Thailand mempunyai perdagangan tingkat tinggi diakibatkan oleh praktik sosial dalam budaya yang memungkinkan berkembangnya perdagangan manusia. Sedangkan dari sisi ekonomi, pemahaman diambil atas arus migrasi di Thailand. Perdagangan manusia sendiri merupakan konsekuensi dari adanya arus migrasi terutama di daerah-daerah yang berbatasan langsung. *Trafficking* ke Thailand didominasi oleh komoditas yang berasal dari negara tetangga seperti Laos, Kamboja, Myanmar, dan sekitarnya.

Menurut Lio-ann Thio yang dikutip Ovanovych, negara tujuan migrasi di wilayah ASEAN ialah Malaysia dan Thailand. Kedua negara tersebut memiliki ekonomi yang berkembang pesat dan mengakibatkan adanya permintaan tinggi akan tenaga kerja yang murah dan efisien. Adanya migrasi antar wilayah melalui saluran yang tidak berdokumen, pada akhirnya memudahkan para pelaku perdagangan untuk melakukan penculikan orang dalam perjalanan mereka ke tujuan pekerjaan atau

⁹⁵ Shih, "Freedom Markets: Consumption and Commerce across Human-Trafficking Rescue in Thailand."

mengelabui mereka menuju ke tempat lainnya. Fenomena ini dijelaskan melalui faktor "dorongan dan tarikan". Para pelaku perdagangan manusia "menarik" pekerja dari negara tetangga dan menawarkan beberapa pekerjaan mereka (korban), sementara negara miskin mereka "mendorong" mereka untuk mencari sumber kehidupan. Hampir sepertiga dari pekerja migran tersebut melakukan perjalanan tanpa dokumen dan dengan mudahnya dapat terjebak para pelaku perdagangan manusia.⁹⁶

Pada faktor sosial budaya, kasus korban yang tidak dilihat sebagai orang Thailand, seperti kelompok minoritas dari Suku Bukit, tidak ditanggapi serius oleh kepolisian setempat. Para penyintas, malah menjadi penjahat karena imigrasi ilegal dan menghadapi risiko deportasi. Setelah menangkap para korban, para pelaku perdagangan manusia membuang barang-barang pribadi para gadis termasuk paspor, membuat mereka rentan, bergantung pada para pelaku perdagangan manusia, dan kecil kemungkinannya untuk mencoba melarikan diri. Meskipun banyak kebijakan yang diperkenalkan oleh pemerintah Thailand, undang-undang tersebut dianggap tidak berguna jika warga negara tidak sadar dan polisi tidak tertarik untuk menegakkannya.⁹⁷

Diskriminasi etnis menjadi pengaruh kelangsungan perdagangan manusia dari sisi politik. Khususnya di Utara, di mana Thailand dan Burma tetap enggan mengakui kelompok etnis di Suku Perbukitan sebagai warga

⁹⁶ Nataliya Opanovych, "Human Trafficking for Sex Exploitation in Thailand," *Securitologia*, no. 1 (2016): 103–10, <https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.2972>.

⁹⁷ Smith, "Trafficking In Thailand: An Analysis of Non-Government Organization' Role." Hal 20

120.000 Bath hingga 240.000 Bath. Pasal 52 Ayat 3 menjelaskan bahwa jika pelanggaran dilakukan terhadap anak yang belum berusia 15 tahun, pelaku akan diancam dengan hukuman penjara dari 8 hingga 15 tahun dan denda 160.000 Bath hingga 300.000 Bath.⁹⁹

Pada pemerintahan Prayut Chan ocha di tahun 2015, dilakukan perubahan mengenai Anti Human Trafficking Act B.E 2551 Tahun 2008 mengenai seberapa lama pelaku dihukum dan seberapa besar denda yang diterima oleh pelaku. Pada ayat 1 pasal 52 menerangkan bahwa pelaku pelanggar perdagangan manusia akan dijatuhi hukuman 4 sampai 5 tahun penjara dan denda antara 400.000-1.200.000 Bath. Berdasarkan ayat 2, jika pelaku melakukan kejahatan terhadap korban antara usia 15-18 tahun, pelaku akan dikenakan hukuman 6 sampai 15 tahun penjara dengan denda 600.000 Bath hingga 1.500.000 Bath. Pada ayat 3, jika pelaku melakukan pelanggaran terhadap korban dibawah usia 15 tahun dan orang cacat, maka pelaku akan menerima hukuman 8 sampai 20 tahun penjara dan denda 800.000 hingga 2.000.000 Bath. Menurut Ayu yang mengutip Liberty Asia, selain perubahan, juga dilakukan penambahan undang-undang jika korban perdagangan manusia meninggal dunia. Pelaku dan orang-orang yang terlibat (mendukung dan membantu) operasi perdagangan manusia maka mendapatkan hukuman penjara seumur hidup maupun hukuman mati.¹⁰⁰

⁹⁹ Thalib, "Analisis Sekuritisasi Kasus Human Trafficking Di Thailand Tahun 2014-2019." Hal 59

¹⁰⁰ Thalib. Hal 59-60

Thailand telah membangun kerjasama dan koordinasi internal dan eksternal yang lebih efektif, seperti kerjasama dengan ILO (*International Labour Organization*) dan pihak swasta di dalam dan luar negeri. Kedua, *Prosecution*, di mana Pemerintah Thailand meningkatkan anggarannya untuk dapat penegakan hukum, termasuk pembentukan beberapa Lembaga, antara lain RTP-ATC (*Royal Thailand Police-Anti Trafficking Centre*), ATPD (*Anti Trafficking Person Division*), hingga CCCIF (*Command Centre of Combating Illegal Fishing*). Ketiga, *Protection*, di mana berbagai cara dilakukan pemerintah Thailand untuk memungkinkan para korban memperoleh layanan pemerintah termasuk perawatan medis, rehabilitasi fisik dan mental. Keempat, *Prevention*, dengan penerapan hukum anti perdagangan manusia, peningkatan hak-hak migran, hingga pendirian lembaga pencegahan perdagangan manusia bernama TOEA (*Thailand Overseas Employment Administration*) oleh pemerintah Thailand. Kelima, *Partnership*, di mana pemerintah Thailand menjalankan beberapa kerjasama dengan aktor nasional dan internasional, mulai dari keikutsertaan forum komunitas Thailand PPCSP (*Public, Private Civil Society Partnership*), hingga kerjasama internasional seperti dengan Laos, Vietnam, serta kerjasama dengan IOM (*International Organization for Migration*).¹⁰²

c. *United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking (UNIAP)*

¹⁰² Misti. Hal 24-25

UNIAP telah mengimplementasikan agenda di Thailand untuk mengurangi dan menanggapi masalah perdagangan manusia. Beberapa hal yang telah dilakukan UNIAP adalah pembuatan kebijakan dan koordinasi dengan Thailand dalam bentuk pencegahan, perlindungan, dan penindakan. Pertama adalah Kebijakan dan Koordinasi yang mengintegrasikan semua jenis intervensi perdagangan manusia di tingkat pusat dan provinsi. Kedua adalah pencegahan yang dilakukan UNIAP untuk Thailand, yaitu kegiatan di daerah asal dan tujuan termasuk kegiatan kampanye peningkatan kesadaran perdagangan manusia dan migrasi aman, pendidikan, pembangunan kapasitas dan pelatihan kejuruan. Ketiga adalah perlindungan yang dilakukan oleh UNIAP untuk mengurangi kondisi perdagangan di Thailand, dengan kegiatan di daerah asal dan tujuan termasuk penyelamatan, identifikasi, rehabilitasi, bantuan hukum, penerimaan dan reintegrasi. Terakhir adalah penuntutan, yang dilakukan dari para pedagang dan pengeksploitasi di Thailand yang perlu diperkuat dengan mempraktikkan peraturan tentang *Anti Trafficking in Persons Act B.E 2551 (2008)*. Ini berlaku untuk semua orang berdasarkan kesetaraan, bukan hanya perempuan dan anak-anak.¹⁰³

Melihat perkembangan dan peningkatan isu perdagangan manusia di Thailand, UNIAP Thailand juga berperan dalam sektor Pendidikan untuk anak-anak. UNIAP bekerja sama dengan organisasi

¹⁰³ Sihotang and Wiriya, "Human Trafficking in Thailand in Perspective of Human Rights Law." Hal 511-512

dalam komitmen Thailand untuk memerangi dan memberantas perdagangan manusia.¹⁰⁵

Pada tahun 2018, dengan total anggaran sebesar 3.614.040 THB (113.292,79 USD), pembentukan TATIP menghasilkan 29 kasus perdagangan manusia, yang melibatkan pendampingan 48 korban dan penuntutan terhadap 69 pelaku. Dalam menjalankan tugasnya, TATIP pada tahun 2018 bekerja sama dengan pemangku kepentingan di dalam negeri, termasuk LSM dan instansi pemerintah asing terkait. Kasus-kasus utama yang dimaksud melibatkan penyelamatan korban perdagangan orang Kamboja di kapal penangkap ikan bernama Chokchainavee 35 dan penangkapan lima tersangka berkat kerja sama TATIP dengan otoritas Maladewa, dan keberhasilan penumpasan jaringan perdagangan manusia Thailand beroperasi di Jerman dan Thailand karena kerjasama TATIP dengan Kepolisian Jerman.¹⁰⁶ Selain bekerja untuk kasus perdagangan manusia dalam negerinya, disini terlihat juga bagaimana peran TATIP untuk membantu negara lain dalam memerangi perdagangan manusia yang juga menyangkut negaranya.

Penerapan penuntutan dalam memerangi perdagangan manusia, terlihat ketika TATIP menuntut atas dasar IUU *Fishing* di Maladewa pada kapal Chokchainavee 35 tersebut. Sejumlah awak kapal penangkap ikan Kamboja ternyata menjadi korban perdagangan manusia, dibujuk untuk

¹⁰⁵ Thailand Government, "Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts 2017," 2017.

¹⁰⁶ Thailand Government, "Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts 2018."

kerja paksa dan disiksa secara fisik. Surat perintah penangkapan dikeluarkan terhadap lima orang yang telah melakukan perdagangan manusia. Pada 28 Oktober - 1 November 2018, TATIP membawa mereka kembali ke Thailand untuk diadili atas pelanggaran perdagangan manusia. Tiga tersangka lainnya juga ditangkap pada 30 Oktober 2018 di Thailand. Penuntutan dilakukan untuk membuat para pelaku perdagangan manusia tersebut jera dengan memanfaatkan para korbannya untuk dieksploitasi secara berlebihan diatas kapal di lautan lepas. Dalam penuntutan, para terduga pelaku diselidiki terlebih dahulu dengan adanya wawancara yang mendalam kepada para korban yang menjadi awak kapal pemilik dari pelaku. Setelah itu, surat penangkapan diterbitkan sebagai bukti untuk menjerat pelaku yang akan diadili.

Pada 18 April 2018, Polisi Jerman menindak komplotan perdagangan manusia Thailand setelah sejumlah pelaku Thailand diadili atas dasar perdagangan manusia terkait prostitusi. Polisi Jerman berkonsultasi dengan Direktur Pusat Perlindungan Anak, Wanita, Keluarga dan Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia dari Kepolisian Kerajaan Thailand, untuk meminta bantuan dalam menyelidiki dan mengumpulkan bukti di Thailand untuk mendukung kasus tersebut. Disini TATIP bertugas sebagai pemberi informasi karena perannya sebagai koordinator seluruh investigasi perdagangan manusia transnasional.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Thailand Government.

ATPD (*Anti-Trafficking in Person Division*) dan TATIP bekerja sama dengan Proyek HUG dan Yayasan A21 membentuk tim operasi untuk membantu proses penuntutan dan perlindungan perempuan korban Thailand yang telah kembali ke Thailand atau masih tinggal di luar negeri melalui langkah-langkah, yaitu pengiriman tim multidisiplin sampai melakukan wawancara identifikasi korban saat tiba di bandara di Thailand untuk memfasilitasi akses ke layanan pemerintah; membentuk obrolan grup antara tim operasi dan Kedutaan Besar Thailand terkait untuk koordinasi waktu nyata agar polisi dapat dengan cepat mengidentifikasi pelaku dan membantu korban secara tepat waktu; menjalin kerja sama dengan negara lain untuk menjangkau korban dengan cepat dan memberikan konseling oleh CAC (*Child Advocacy Centres*) serta nasihat hukum melalui konferensi VDO oleh ATPD dan TATIP setiap minggu atau atas permintaan korban.

Kasus Kapal Pelayaran Rui Sheng - pada Juli 2020, *Children, Women, Families Protection and Anti Human Trafficking Centre*, RTP, menerima permintaan dari Kedutaan Besar India, Kedutaan Besar Indonesia, dan Kedutaan Besar Bangladesh di Thailand untuk membantu warga negara mereka dipaksa bekerja di kapal pengapalan Rui Sheng. Oleh karena itu, *Children Centre* bersama TATIP, *Ministry of Social Development and Human Security* (MSDHS), dan Stella Maris menyelamatkan dan mengidentifikasi sembilan korban perdagangan manusia dari India, india, Bangladesh, dan Myanmar. Tiga tersangka ditangkap. TATIP dan OAG (*Office of the Attorney General*) menyelidiki

kasus tersebut dan mendakwa ketiga tersangka melakukan perdagangan manusia dengan berkonspirasi untuk mengeksploitasi dari kerja paksa. Pemeriksaan saksi lanjutan dari kesembilan korban selesai pada 15 - 16 Oktober 2020, dan tiga korban warga negara lain telah dipulangkan ke negara asalnya. Ketiga tersangka ditolak jaminannya oleh Pengadilan Kriminal dan saat ini ditahan di Penjara Penjara Bangkok.¹⁰⁸

Pada April 2020, MSDHS bekerja sama dengan Satuan Tugas Anti Perdagangan Orang Thailand (TATIP) dan lembaga lainnya membantu membangun rumah baru untuk korban perdagangan manusia laki-laki berusia 15 tahun dalam Kasus Hua Lamphong (2019) untuk menggantikan yang lama, yang kurang aman bagi korban. Donasi juga diberikan kepada keluarga korban dan orang lain yang tinggal di sekitarnya termasuk makanan pokok, perlengkapan tidur dan peralatan rumah tangga serta masker wajah dan gel alkohol selama situasi COVID-19. Selain itu, Yayasan A21 membantu korban mendapatkan kesempatan pendidikan.¹⁰⁹

Hal tersebut membuktikan bahwa MSDHS memastikan bahwa korban perdagangan manusia dan korban kerja paksa atau layanan yang memilih untuk tinggal di luar tempat penampungan mendapatkan perlindungan dan bantuan yang sama dengan mereka yang tinggal di tempat penampungan. Pembangunan rumah yang dilakukan sesuai dengan prinsip dari 4P yang bertujuan untuk perlindungan atau *protection*. Bahwa Thailand

¹⁰⁸ Thailand Government, "Royal Thai Government 's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts 2020," 2020.

¹⁰⁹ Thailand Government.

memberikan fasilitas keamanan korban untuk mencegah adanya gangguan dari pihak luar yang mencoba untuk

Sedangkan pada tahun 2021, CWP, TICAC, *Thailand Anti Trafficking in Persons* (TATIP), RTP (*Royal Thai Police*), MSDHS, Kementerian Luar Negeri (MFA) dan lembaga terkait bekerja sama untuk menyelamatkan 6 korban Thailand di Myanmar setelah para korban mengajukan pengaduan tentang kerja paksa ke Departemen Urusan Konsuler, MFA. Para korban dipaksa untuk bekerja sebagai penipu online dan diancam dengan kekerasan fisik jika mereka gagal mencapai tujuan tertentu. Semua korban ditempatkan di penampungan pemerintah di bawah program perlindungan saksi dan diberikan bantuan yang sesuai. Pada tahun yang sama antara November hingga Desember 2021, diadakan lokakarya untuk 140 petugas polisi dari CWP, Polda 1-9, TATIP, dan TICAC. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemandirian petugas polisi dalam identifikasi korban.¹¹⁰ Adanya lokakarya ini bertujuan untuk meningkatkan efikasi dari penuntutan perdagangan manusia di negara Thailand.

Dalam perannya optimalisasi TATIP, Amerika Serikat melalui FBI dan HSI melakukan pengorganisasian dalam pembagian ilmu pengetahuan dan pengalaman untuk mengoperasikan efektivitas TATIP dan TICAC di tahun 2018. Langkah tersebut dilakukan dalam 6 sesi seperti berkaitan dengan forensik digital dan pertukaran intelijen. Langkah tersebut membuahkan hasil positif ketika adanya penangkapan tersangka dalam

¹¹⁰ Thailand Government, "Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts 2021," 2021.

sepuluh kasus yang ditangani, berkaitan dengan perdagangan manusia dan pornografi anak. Disini FBI dan HSI bertindak sebagai aktor yang membantu meningkatkan kapasitas kedua lembaga tersebut sesuai dengan tingkat organisasi. Pemanfaatan dan penguatan yang dilakukan, pada akhirnya mempengaruhi kinerja dari TATIP dan TICAC dalam melakukan suatu tindakan atas kasus perdagangan manusia yang ada.

Dengan kemajuan teknologi yang cepat memungkinkan pelaku perdagangan manusia untuk menjangkau anak-anak dan kelompok rentan lainnya dengan lebih mudah, menambah sifat perdagangan manusia yang sudah kompleks. Petugas anti-perdagangan manusia harus mengembangkan pengetahuan dan pemahaman tentang kasus-kasus perdagangan manusia yang melibatkan penggunaan teknologi untuk memastikan pengumpulan informasi yang memadai untuk penyelidikan menyeluruh dan menghindari meminta korban untuk wawancara berulang.

Meskipun Amerika Serikat tidak memiliki tugas untuk mengawasi keamanan dunia, namun negara tersebut memiliki kecenderungan untuk membantu negara-negara berkembang yang membutuhkan bantuan dalam mengamankan masyarakat mereka agar tidak terjebak dalam kasus perdagangan manusia. Pada tahun 2019, Proyek HUG bekerja sama dengan TICAC, OAG, dan HSI yang mewakili AS, menyelenggarakan pelatihan pakar *Inter-Agency Taskforce against Trafficking* untuk 55 petugas anti-perdagangan manusia dari lembaga pemerintah (TICAC, OAG, MSDHS, dan TATIP) dan sembilan mitra LSM dari lima CAC (*Children Advocacy*

Center) di seluruh Thailand. Pelatihan ini berlangsung selama tiga tahun dan mencakup berbagai sesi diantaranya menyangkut tentang isu, kendala, dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing Lembaga dalam menangani kasus perdagangan manusia. berbagai praktik terbaik, dan pelatihan spesialis korban untuk menarik sumber daya untuk mengatasi kendala dan meningkatkan penuntutan dan pencegahan dalam kasus perdagangan manusia yang lebih kompleks atau melibatkan trauma psikologis para korban.

Sesuai perannya pada konsep *regional protector* yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Amerika Serikat melalui HSI (*Homeland Security Investigation*), bekerja sama dengan lembaga swasta maupun pemerintah dalam negeri dalam melakukan beberapa pelatihan yang ditujukan untuk lembaga yang bertugas menangani perdagangan manusia di Thailand. Atas inisiatif Thailand yang juga berusaha menangani perdagangan manusia di negaranya dengan pembentukan TATIP, maka hal tersebut juga dapat menjadi alasan AS ikut berperan sesuai dengan konsep *regional protector* dimana suatu negara merasa harus membantu melindungi negara-negara berkembang yang benar-benar membutuhkan dan meminta bantuan mereka dengan prasyarat penting, bersedia dan mampu membantu diri mereka sendiri juga.

D. Peran Amerika Serikat dalam Optimalisasi Kinerja TICAC dalam Menangani Perdagangan Manusia di Thailand

Seiring dengan semakin kompleksnya pelanggaran seks anak, pemerintah semakin sadar akan perlunya unit khusus, yang dilengkapi dengan teknologi kelas dunia, untuk memberantas kejahatan ini. Untuk memberantas eksploitasi seksual anak, RTP (*Royal Thai Police*) telah membentuk satgas khusus yang beranggotakan aparat kepolisian yang menangani kasus eksploitasi seksual anak. Pada tahun 2015 *Internet Crime against Children Center* (ICAC) telah didirikan yang secara efektif dijalankan pada 8 Januari 2016 di bawah Perintah RTP No. 7/ 2558, berfungsi sebagai badan antar-lembaga khusus yang secara efektif mengatasi meningkatnya kompleksitas pelanggaran *online* (serta *offline*) terhadap anak-anak berdasarkan undang-undang tersebut. Sejak pemerintah mengesahkan Amandemen KUHP No. 24 (2015) yang berlaku efektif pada tanggal 7 Desember 2015 tentang Tindak Pidana Pornografi Anak, dua kasus telah didakwa di bawah satuan tugas ICAC Thailand, yang telah diberi tanggung jawab untuk menegakkan Undang-Undang tersebut secara komprehensif. Satgas tersebut terdiri dari 34 perwira nasional yang dilengkapi dengan pelatihan dan pengalaman internasional. Mereka berfungsi sebagai agen yang berfokus untuk bekerja dengan mitra di luar negeri, seperti *Federal Bureau Investigation* (FBI), *Homeland Security Investigation* (HSI) dan Pemerintah Australia melalui *Australia-Asia Programme to Combat Trafficking in Persons* (AAPTIP), karena banyak dari kejahatan ini bersifat transnasional.¹¹¹

¹¹¹ The Royal Thai Government, "Trafficking In Persons Report" (Bangkok, 2015).

Salah satu pencapaian yang dikembangkan sebagai hasil kerja sama yang erat antara TICAC dan HSI ialah penumpasan jaringan perdagangan manusia Sumalee di Minnesota pada tahun 2016. Di kancah internasional, TICAC mendapat pengakuan luas di antara komunitas penegak hukum internasional dan masyarakat sipil global sebagai inisiatif Thailand terhadap pornografi anak dan aktivitas terkait di Internet. Operasi TICAC menerapkan praktik terbaik di bidang tindakan proaktif terhadap pelecehan seksual anak di Internet. Antara 8 - 11 Agustus 2016, Pejabat senior TICAC dan perwakilan HSI dan FBI di Bangkok diundang untuk mempresentasikan karya mereka tentang TICAC, yaitu "*TICAC: Thailand's Robust Response to a Transnational Criminal Threat*" pada Konferensi Tahunan Kejahatan Terhadap Anak ke-28 di Dallas, Texas, Amerika Serikat. Selain itu, Pusat Advokasi Anak telah didirikan di provinsi Chiang Mai dan kota Pattaya, dan Provinsi Phuket menjadi pusat selanjutnya. *Federal Bureau Investigation* membantu memberikan dukungan teknis dan mempromosikan pendekatan yang berpusat pada korban dalam pekerjaan pusat untuk memerangi perdagangan manusia.¹¹²

¹¹² Thailand Government, "Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts 2016," 2016.

perdagangan seks anak, tim regional Satuan Tugas TICAC yang melakukan serangkaian operasi siber rahasia berhasil mengungkap pembentukan grup pribadi tertutup di jejaring sosial seperti Facebook untuk ajakan prostitusi di antara anggotanya di Provinsi Nakorn Ratchasima (Korat).¹¹³

Kerja TICAC pada tahun 2018 ialah mengungkap 124 kasus, 21 kasus terkait perdagangan manusia, 16 kasus terkait kekerasan seksual anak, 60 kasus kepemilikan materi pornografi anak, 11 kasus perdagangan manusia dan pelecehan seksual anak, 5 kasus perdagangan manusia dan kepemilikan materi pornografi anak, 3 kasus perdagangan manusia, pelecehan seksual anak, dan kepemilikan materi pornografi anak, 8 kasus pelecehan seksual anak dan kepemilikan materi pornografi anak. Pada tahun 2018, Divisi *Anti-Trafficking in Persons* (ATPD) bekerja sama dengan instansi pemerintah dan LSM lainnya menangkap pelaku perdagangan orang dalam 14 kasus. TICAC membantu 107 korban dan menggunakan pendekatan yang berpusat pada korban saat melakukan penyelidikan. TICAC di bawah Kepolisian Kerajaan Thailand ikut menulis Buku Panduan “TICAC 101” dengan FBI, HSI, dan Proyek HUG. Buku pegangan ini bertujuan untuk memberikan petugas TICAC pedoman untuk penyelidikan awal dan penuntutan kasus yang berkaitan dengan eksploitasi seksual anak secara online. Salinan buku panduan ini juga telah didistribusikan ke seluruh unit operasional di seluruh Thailand.¹¹⁴

¹¹³ Thailand Government, “Royal Thai Government’s Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts 2017.”

¹¹⁴ Thailand Government, “Royal Thai Government’s Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts 2018.”

Internet Aman dan Proyek “*Youth Must Know*” adalah kolaborasi berkelanjutan antara TICAC dan LSM untuk mencegah kelompok rentan dari perdagangan manusia dan bentuk eksploitasi lainnya. TICAC bekerja sama dengan Proyek HUG, ATPD, OAG, Departemen Litigasi Perdagangan Orang, Polda Provinsi 5, Kementerian Pendidikan, FBI, HSI, Zoe International dan LSM lainnya menandatangani perjanjian dengan 12 sekolah untuk menyelenggarakan pelatihan bagi anak sekolah tentang mencegah dan menekan perdagangan manusia, dan memasang sistem internet yang aman untuk sekolah-sekolah di Thailand Utara, Bangkok, dan Provinsi Kanchanaburi. Pada tahun 2019, TICAC menangkap total 72 kasus kejahatan internet terhadap anak-anak, yang melibatkan 84 pelaku (59 laki-laki dan 25 perempuan). Sebanyak 44 anak korban (12 laki-laki dan 32 perempuan) berhasil diselamatkan. Dari kasus yang ditangkap, 26 kasus (36,11 persen) terkait perdagangan manusia. Selain itu, TICAC menyelenggarakan 47 pelatihan tentang kejahatan internet terhadap anak. Dari jumlah tersebut, 40 pelatihan dilaksanakan di Thailand dan 7 pelatihan dilaksanakan di negara lain seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Australia, dan Amerika Serikat.¹¹⁵

Pada tahun 2020, TICAC menerima lebih dari 260.000 tip tentang kasus mencurigakan dari *National Center for Missing and Exploited Children* (NCMEC) AS dibandingkan dengan 117.232 tip pada tahun 2019 yang meningkat lebih dari 121 persen. Selain itu, TICAC menerima sekitar

¹¹⁵ Thailand Government, “Royal Thai Government’s Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts 2019,” 2019.

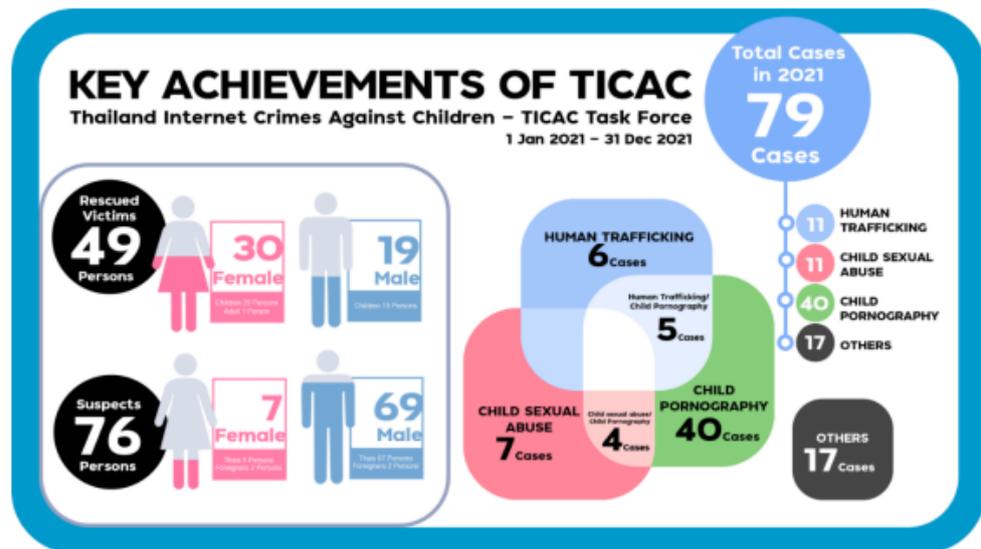
200 tip dan pengaduan melalui saluran media sosialnya. Alhasil, TICAC telah melakukan investigasi dan berhasil menangkap total 94 kasus dugaan pada tahun 2020. Dari jumlah tersebut, 22 di antaranya adalah kasus perdagangan manusia. Lainnya termasuk 65 kasus eksploitasi anak, 39 kasus kepemilikan pornografi anak, dua kasus pelanggaran Computer Crime Act B.E. 2560, dan empat kasus tindak pidana lainnya. TICAC telah bekerja sama secara erat dengan FBI, Institut Keamanan Dalam Negeri A.S., dan mitra lainnya dalam pembagian intelijen yang berhasil menyelamatkan lebih dari 43 anak dan menangkap 97 pelaku pada tahun 2020. Menanggapi meningkatnya jumlah dugaan kasus eksploitasi anak secara daring, TICAC meluncurkan operasi serangan dunia maya di seluruh negeri. Hal ini menyebabkan 44 penangkapan, 9 penggeledahan di 24 provinsi dan terungkapnya lebih dari 150.000 berkas pelecehan seksual anak yang melibatkan lebih dari 100 anak. Pada saat itu, operasi ini menjadi operasi dalam menindak eksploitasi anak secara daring terbesar dan tersukses di Thailand.¹¹⁶

Pada tahun 2021, TICAC bekerja sama dengan Divisi Kejahatan Teknologi Tinggi, menerima petunjuk dari mitra di berbagai sektor termasuk hotline 1599 dan 1300, Facebook, Twitter, LSM, serta kerja sama internasional dengan NCMEC. TICAC menerima 365 tip atau laporan kejadian. Dari jumlah tersebut, 49 tip/laporan merupakan permintaan

¹¹⁶ Thailand Government, "Royal Thai Government 's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts 2020."

bantuan kepada korban, yang berujung pada penyelamatan 40 korban oleh TICAC.¹¹⁷

Gambar 4: Pencapaian Utama TICAC Tahun 2021



Sumber: Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts 2021

Selama tahun 2021, TICAC menginisiasi sebanyak 79 kasus, terdiri dari 11 kasus perdagangan orang, 11 kasus eksploitasi seksual anak, 40 kasus kepemilikan pornografi anak, dan 17 kasus lainnya. Terdapat 76 pelanggar. Dari jumlah tersebut, 72 orang merupakan warga negara Thailand dengan empat warga negara asing. TICAC menyelamatkan total 49 korban.

TICAC, bekerja sama dengan *Anti-Trafficking in Persons Division* (ATPD), RTP, *Office of the Attorney-General* (OAG), dan Proyek HUG, menyelenggarakan kampanye dan lokakarya daring dalam meningkatkan

¹¹⁷ Thailand Government, "Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts 2021."

kesadaran untuk mencegah eksploitasi seksual daring untuk siswa, orang tua, psikolog, guru, dan anggota administrasi sekolah, serta kampanye khusus untuk siswa tunarungu yang dihadiri oleh 5.000 orang. Buklet dibagikan kepada orang tua, guru, dan siswa untuk memberi tahu mereka tentang risiko berbagai bentuk pornografi anak online dan perdagangan anak, serta saluran di mana mereka dapat melaporkan kasus dan mencari bantuan dari lembaga pemerintah. Selain itu, konseling tatap muka dan online serta dukungan psikologis yang diinformasikan tentang trauma untuk korban masa lalu, serta nasihat untuk anak-anak juga disediakan.¹¹⁸

Salah satu optimalisasi dari kerja TICAC ialah Kerjasama yang dilakukan dengan NCMEC yang dilakukan pada tanggal 27 Maret 2017. *National Center for Missing and Exploited Children* (NCMEC) sendiri merupakan lembaga dalam negeri Amerika Serikat dalam menangani eksploitasi anak nasional. *National Center for Missing and Exploited Children* (NCMEC) AS dan *Thailand Internet Crimes Against Children* (TICAC) yang diwakili Satgas Kepolisian Kerajaan Thailand menandatangani perjanjian berbagi informasi untuk memerangi eksploitasi yang memberikan otoritas Thailand akses langsung ke laporan NCMEC tentang kasus eksploitasi seksual anak. Meskipun TICAC telah menerima *CyberTips* dari NCMEC melalui kantor Investigasi Keamanan Dalam Negeri di Bangkok, menerima rekomendasi langsung dari NCMEC akan memungkinkan respons yang lebih fleksibel terhadap kasus darurat dan

¹¹⁸ Thailand Government.

akses langsung ke data intelijen kriminal. Amerika Serikat dan Thailand memiliki sejarah panjang dalam kerja sama penegakan hukum, termasuk kerja sama dalam isu-isu utama seperti memerangi eksploitasi anak.¹¹⁹

Penandatanganan Kebijakan Akses Jarak Jauh *CyberTipline* dilakukan di kantor NCMEC di Alexandria, Virginia oleh Jenderal Polisi Tamasak Wicharaya, Wakil Direktur Pusat Anak, Wanita, Perlindungan Keluarga dan Anti-Perdagangan Manusia, Kepala TICAC, Mr. John Clark, Presiden dan CEO NCMEC. Upacara penandatanganan dihadiri oleh perwakilan dari Departemen Luar Negeri AS, Biro Investigasi Federal (FBI) dan Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI). Duta Besar Thailand untuk AS Pisan Manawapat; Letnan Jenderal Polisi Jaruvat Vaisaya, Komisaris Urusan Hukum dan Litigasi, Polisi Kerajaan Thailand; David Prince, Penjabat Wakil Asisten Direktur, Operasi Internasional HSI; dan Ms. Thanida Menasavet, Konselor, Kedutaan Besar Kerajaan Thailand juga bergabung sebagai saksi.

Mengingat sifat transnasional dari masalah eksploitasi seksual anak, kedua belah pihak menyatakan komitmen yang kuat untuk bekerja sama secara erat sebagai mitra untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan eksploitasi. Duta Besar Pisan menekankan bahwa Thailand dan AS adalah mitra yang saling dapat diandalkan dan memuji FBI, HSI dan NCMEC

¹¹⁹ U.S Embassy and Consulate in Thailand, "United States and Thailand Signed an Information-Sharing Agreement to Combat Child Sexual Exploitation," accessed March 2, 2023, <https://th.usembassy.gov/us-thailand-signed-information-sharing-agreement-combat-child-sexual-exploitation/>.

karena telah bekerja sama dengan rekan Thailand mereka untuk membawa pelaku kejahatan seks anak ke pengadilan.¹²⁰

Pada optimalisasi TICAC, selain dapat berdampingan dengan optimalisasi TATIP pada pembahasan sebelumnya, juga terdapat pengoptimalan TICAC secara tersendiri oleh AS. Optimalisasi tersebut terlihat ketika terjalannya kerjasama antar Lembaga-lembaga Thailand dengan Biro Urusan Narkotika Internasional dan Penegakan Hukum (INL) dari Departemen Luar Negeri, Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI) dari Departemen Keamanan Dalam Negeri, FBI, dan Kedutaan A.S. di Bangkok pada tahun 2020 dalam penuntutan kasus perdagangan manusia dan perlindungan korban perdagangan manusia, termasuk melalui pertukaran informasi dan intelijen yang relevan, dan sesi peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum.

Selain itu, pada tahun yang sama terbentuklah *Thai-U.S. Taskforce on Anti-Trafficking in Persons* pada bulan November sebagai bentuk kerjasama yang semakin erat antar negara dan sebagai sarana dalam membagikan informasi terkini mengenai upaya Thailand dalam menumpas perdagangan manusia. Lembaga yang terlibat seperti RTP, *Department of Special Investigation* (DSI), MSDHS, *the Ministry of Labour* (MOL), Kementerian Luar Negeri, FBI, HSI, INL, Departemen Kehakiman AS, Departemen Luar Negeri AS, dan USAID. Pembentukan kerjasama tersebut seperti berkaitan dengan teknologi yang menggunakan *blockchain* dalam melacak

¹²⁰ Royal Thai Embassy, "Thailand and the U.S. Strengthen Partnership to End Child Sexual Exploitation."

pembayaran pekerja, koperasi online penyamaran tingkat lanjut, dan forensik digital, kemudian identifikasi korban, pencegahan perdagangan manusia, dan pelatihan atau seminar.

Konsep *regional protector* juga terlihat dalam peran Amerika tersebut. Meskipun masih terdapat aktor yang sama seperti HSI dan FBI, dan tujuan yang cenderung sama, namun terdapat perbedaan ketika optimalisasi tersebut turut serta mengajak perwakilan dari negara Amerika Serikat yang lainnya. Selain itu, optimalisasi TICAC juga terlihat pada tahun 2021 ketika HSI dan FBI turut bekerja sama dalam produksi cerita interaktif berjenis fiksi yang berjudul “*Expose*” yang ditayangkan secara *online* yang kemudian mendapatkan atensi dari masyarakat luas dan menjadi viral.

Dalam upayanya, Thailand melakukan peningkatan kapasitas setiap tahunnya pada Lembaga maupun undang-undang anti-perdagangannya. Pada tahun 2018, Kantor Kehakiman menyelenggarakan lima seminar untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam penuntutan kasus perdagangan manusia. Selain itu, DSI menyelenggarakan sejumlah seminar dan workshop sepanjang tahun 2018. Contohnya pada 28-30 November 2018, DSI mengadakan seminar untuk menarik pelajaran dari kasus perdagangan manusia yang menonjol. Seminar tersebut memberikan kesempatan bagi berbagai lembaga untuk berbagi informasi dan

pengalaman dalam mengadili pelaku dan membantu korban perdagangan untuk operasi yang lebih baik di masa depan.¹²¹

Selain melakukan peningkatan kapasitas dalam negerinya, Thailand juga meningkatkan upaya bersama baik kantar pemerintah negara maupun non pemerintah. Pada tahun 2019, Thailand melakukan Pengembangan Kerjasama Internasional lembaga penegak hukum Pemerintah Kerajaan Thailand, khususnya RTP, OAG, dan Kantor Kehakiman, menyelenggarakan pertemuan bilateral dengan Myanmar, Laos, Malaysia, Indonesia, Jepang, Australia, Jerman, dan Maroko. Selain itu, lembaga pemerintah Thailand menjadi tuan rumah bersama atau berpartisipasi dalam pelatihan, seminar, dan lokakarya peningkatan kapasitas dengan Singapura, Filipina, Republik Korea, serta organisasi internasional, seperti UNODC dan INTERPOL. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempromosikan kerjasama anti-perdagangan manusia melalui pertukaran informasi dan intelijen, pemahaman yang lebih baik tentang proses penuntutan di negara lain, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan kemungkinan saling membantu dalam penuntutan kasus perdagangan manusia.¹²²

Pada tahun yang sama, berbagai sesi peningkatan kapasitas aparat penegak hukum pada lembaga-lembaga anti perdagangan manusia pun terus diselenggarakan, yang terdiri dari: Pelatihan teknis seperti pelatihan dan seminar tentang peraturan perundang-undangan yang relevan, Teknik dan

¹²¹ Thailand Government, "Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts 2018."

¹²² Thailand Government, "Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts 2019."

alat dalam investigasi kasus perdagangan manusia khususnya investigasi online dan pengumpulan data digital, Pelatihan di tempat kerja untuk petugas penegak hukum dan Dukungan interpretasi Penerjemah bahasa asing termasuk Myanmar, Mon, Inggris, Prancis, Cina, dan bahasa isyarat yang didaftarkan dan tersedia untuk mendukung proses penyelidikan.¹²³

Selain masih mempererat kerjasama antar aktor internasional, pada tahun 2020, Thailand juga menekankan untuk meningkatkan keahlian dan kapasitas penegak hukumnya dalam menangani kasus perdagangan manusia. Peningkatan kapasitas tersebut terdiri dari: Penguatan kerjasama multi pihak termasuk DSI, RTP, OAG, dan Kejaksaan dengan lembaga pemerintah, LSM, jaringan masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengadakan pertemuan dan pelatihan untuk bertukar informasi dan arahan tentang kasus perdagangan manusia, Penguatan keahlian teknis salah satunya penyelenggaraan lokakarya teknis tahunan yang diselenggarakan oleh RTP. Selanjutnya mempromosikan lebih banyak penggunaan pendekatan *trauma-informed care*, Memastikan Standar Proses Penuntutan Bekerja sama dengan ASEAN-ACT, dan Meningkatkan kapasitas Personel Pengadilan Kantor Kehakiman.¹²⁴

Selain pelatihan atau pertemuan dalam mempromosikan *trauma-informed care* selama proses peradilan, Kantor Kehakiman juga menyelenggarakan kegiatan seperti: seminar bagi para hakim Pengadilan

¹²³ Thailand Government.

¹²⁴ Thailand Government, "Royal Thai Government 's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts 2020."

Tingkat Pertama tentang praktik Pengadilan Tinggi dalam mempertimbangkan kasus-kasus perdagangan manusia, bekerja sama dengan Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), pencetakan buku pegangan dan bahan referensi untuk digunakan oleh personel pengadilan untuk memastikan standar proses peradilan di seluruh kasus perdagangan manusia, dan meningkatkan kapasitas dalam pencegahan eksploitasi seksual anak .

Pada tahun 2021, peningkatan kapasitas digalakkan pada Jaksa Penuntut Umum yang pada 12 Mei, OAG membentuk kelompok kerja untuk mengerjakan proyek peningkatan sistem peradilan yang ramah anak di antara jaksa penuntut umum yang bekerja dengan anak korban perdagangan manusia, pelecehan seksual, dan bentuk kekerasan lainnya terhadap anak. Hal ini menyebabkan OAG melakukan perbaikan SOP bagi jaksa penuntut umum dalam prosedur wawancara korban dan persiapan korban untuk pemeriksaan saksi di ruang sidang. hal ini membantu meminimalkan risiko korban mengalami trauma kembali dan mempersiapkan korban untuk prosedur pengadilan." Selain itu, pada bulan Oktober, OAG juga berkolaborasi dengan *U.S. Homeland Security Investigation* (HSI) mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas secara online untuk 90 Jaksa Penuntut Umum tentang mewawancarai anak korban

eksploitasi seksual dan perdagangan manusia dengan menggunakan pendekatan *trauma-informed care*.¹²⁵

Berdasarkan peningkatan kapasitas yang telah disebutkan sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan bahwa level kapasitas yang digunakan ialah kapasitas organisasi. Penggunaan kapasitas ini terlihat pada bagaimana Thailand meningkatkan berbagai kapasitas pada sektor-sektor yang berkaitan dengan lembaga penanganan perdagangan manusia. Pada kapasitas yang paling dasar, telah ditingkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai pengadaan seminar, *workshop*, serta pelatihan-pelatihan; sumber daya fisik juga ditingkatkan dengan meliputi pencetakan buku dan bahan referensi sebagai pegangan Lembaga pengadilan dan ketersediaan penerjemah Bahasa asing dan Bahasa isyarat dalam proses penyelidikan; hubungan antar lembaga dengan penguatan kerjasama multi pihak diantaranya DSI, RTP, OAG, dan Kejaksaan dengan lembaga pemerintah, LSM, jaringan masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengadakan pertemuan dan pelatihan untuk bertukar informasi dan arahan tentang kasus perdagangan manusia,

Seperti negara berkembang lainnya yang menerima bantuan luar negeri, dalam penanganan perdagangan manusia, Thailand juga menerima bantuan luar negeri melalui USAID berupa dana yang termasuk dalam bantuan bilateral (*Bilateral Foreign Aid*). *Bilateral Foreign Aid* selaras dengan tujuan dan komitmen Amerika Serikat yang ingin melawan

¹²⁵ Thailand Government, "Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts 2021."

Perdagangan Internasional. CTIP USAID Asia berfokus pada negara-negara Mekong Bawah, negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, dan Bangladesh, Nepal, dan republik-republik di Asia Tengah. Program ini juga mengkaji aliran perdagangan utama di Asia Selatan dan ke negara tujuan di Asia Timur dan Negara-negara Teluk untuk membantu mengakhiri perdagangan manusia.¹²⁷

Program ini berjangka waktu lima tahun dari tahun 2016-2021 dengan dibiayai oleh USAID. Salah satu hasil dari program ini ialah menguji coba teknologi berkelanjutan untuk konektivitas di laut yang akan menghubungkan pekerja di kapal penangkap ikan dengan sumber informasi dan bantuan untuk mengurangi risiko perdagangan yang dilakukan dengan menjalin kemitraan dengan perusahaan global dan program USAID CTIP Thailand di tingkat nasional.¹²⁸

Dengan mengambil pendekatan multi-sektoral pada USAID CTIP Asia ini menghasilkan beberapa dampak dan hasil yang diantaranya terdiri dari:

1. Membangun jaringan kolaboratif yang memungkinkan lebih dari 700 organisasi yang bekerja di CTIP untuk terhubung dan bertukar praktik terbaik dan informasi dengan cara yang aman, termasuk Peta Perjalanan Korban, untuk membantu melacak rute perdagangan manusia.

¹²⁷ United States Agency International Development, "USAID Asia Counter Trafficking in Persons," [usaaid.gov](https://www.usaid.gov/asia-regional/fact-sheets/usaaid-asia-counter-trafficking-persons), accessed October 2, 2022, <https://www.usaid.gov/asia-regional/fact-sheets/usaaid-asia-counter-trafficking-persons>.

¹²⁸ USAID Asia CTIP, "USAID Asia Counter Trafficking in Persons," USAID, accessed October 2, 2022, <https://www.usaid.gov/asia-regional/fact-sheets/usaaid-asia-counter-trafficking-persons>.

2. Menilai dan mendokumentasikan situs web yang digunakan oleh pekerja berketerampilan rendah di Kamboja untuk mencari pekerjaan secara lokal, mengurangi kebutuhan untuk bermigrasi ke Thailand dalam kondisi yang berpotensi berbahaya. Dengan berbagi pelajaran dari situs ini ke seluruh kawasan, proyek ini menyediakan model yang dapat direplikasi untuk negara lain yang ingin mengatasi tantangan ini.
3. Dalam kemitraan dengan perusahaan global dan program USAID CTIP Thailand tingkat nasional, menguji coba teknologi berkelanjutan untuk konektivitas di laut yang akan menghubungkan pekerja di kapal penangkap ikan dengan sumber informasi dan bantuan untuk mengurangi risiko perdagangan mereka.
4. Mengembangkan dan menyebarluaskan 15 produk pembelajaran kepada lebih dari 400 peneliti lokal dan organisasi masyarakat sipil.

Proyek USAID Thailand *Counter Trafficking in Persons* (USAID Thailand CTIP) merupakan proyek senilai \$10 juta dengan prakarsa lima tahun yang didanai oleh Badan Pembangunan Internasional AS (USAID). Proyek ini diimplementasikan oleh Winrock International dan para mitranya. Berdasarkan praktik terbaik internasional dan pengetahuan lokal, kegiatan mencakup kemitraan dengan sektor swasta untuk mengurangi eksploitasi tenaga kerja; komunikasi perubahan perilaku untuk mengatasi

diskriminasi kelompok berisiko; dan jaringan informasi, layanan dan dukungan bagi mereka yang rentan dan penyintas perdagangan manusia.¹²⁹

Proyek *Counter Trafficking in Persons* USAID Thailand (USAID Thailand CTIP) berupaya untuk mengurangi perdagangan orang (TIP) dan untuk lebih melindungi hak-hak orang yang diperdagangkan di Thailand dengan mengurangi permintaan dan insentif untuk menggunakan tenaga kerja yang diperdagangkan, memberdayakan populasi berisiko untuk melindungi hak-hak mereka, dan memperkuat sistem perlindungan bagi para penyintas. TIP di Thailand didorong oleh permintaan akan tenaga kerja berketerampilan rendah dan berakar dari diskriminasi sosial yang mengakar serta kurangnya regulasi dan penegakan hukum. Pandemi COVID-19 dan langkah-langkah terkait yang membatasi dan menanggulangi pergerakan melalui saluran migrasi reguler semakin meningkatkan kerentanan migran terhadap eksploitasi dan TIP.

Pada tahun pertama, tim proyek meluncurkan kegiatan pencarian fakta di Bangkok, Chiang Rai, Sakaew dan Surathani, dengan fokus pada sektor pertanian, konstruksi dan perikanan serta pengolahan hasil laut. Selain itu, proyek ini bekerja sama dengan Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia dan pejabat pemerintah di tingkat nasional, regional, dan lokal untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam sistem dan layanan bagi korban perdagangan manusia. CTIP USAID Thailand juga

¹²⁹ Reliefweb, "USAID Announces Project to Help Counter Trafficking in Persons in Thailand."

melibatkan bisnis dan pemberi kerja yang secara aktif bekerja untuk memitigasi risiko perdagangan manusia untuk menjajaki peluang kemitraan dan kerja sama.¹³⁰

Pada pengurangan permintaan dan insentif untuk tenaga kerja yang diperdagangkan, CTIP USAID Thailand memprioritaskan sektor-sektor yang paling terpapar TIP, antara lain perikanan, pertanian, dan konstruksi. Proyek ini membahas risiko TIP dalam kemitraan dengan perusahaan yang bekerja di provinsi target Bangkok, Chiang Rai, Trat, Sa Kaeo, Surat Thani, dan Phuket, yang semuanya memiliki populasi pekerja migran yang signifikan atau terletak di dekat jalur perdagangan manusia. CTIP USAID Thailand juga melaksanakan kampanye nasional untuk mengurangi toleransi warga negara Thailand terhadap kerja paksa dalam produk dan layanan, sekaligus meningkatkan empati terhadap migran dan orang yang diperdagangkan.

Dalam memberdayakan penduduk yang berisiko, CTIP USAID Thailand memperluas akses ke informasi yang andal dan alat perlindungan dan bekerja sama dengan memperkuat organisasi lokal untuk menjangkau dan membantu migran yang rentan dengan lebih baik. Perangkat Sumber Daya Perlindungan Migran Thailand yang dikembangkan oleh proyek berisi informasi terbaru tentang kebijakan dan peraturan, peta penyedia layanan interaktif, dan alat lain untuk organisasi masyarakat sipil yang melayani

¹³⁰ Reliefweb.

populasi migran. CTIP USAID Thailand juga melatih para pemimpin relawan migran dalam menemukan tanda-tanda eksploitasi dan perdagangan manusia, merujuk calon korban ke layanan yang ada, mendukung mereka dalam mengakses mekanisme pengaduan, dan memperkuat suara migran dalam wacana politik dengan memberdayakan mereka untuk menangkap dan membagikan cerita mereka melalui berbagai alat dan informasi.¹³¹

Sedangkan untuk memperkuat sistem proteksi, CTIP USAID Thailand melibatkan pemangku kepentingan pemerintah di tingkat nasional dan provinsi. Bekerja dalam kemitraan dengan tujuan bersama untuk menyelaraskan prosedur dan proses yang ada sambil mengidentifikasi dan membantu orang-orang yang diperdagangkan dengan standar praktik berbasis bukti internasional dan regional. Selain itu, proyek memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mempromosikan pendekatan berbasis hak untuk identifikasi dan bantuan korban. Ini termasuk penelitian kualitatif tentang praktik-praktik baik dalam pendampingan bagi para penyintas TIP lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, dan interseks (LGBTQI+) dan bagaimana penerapannya di Thailand. Terakhir, proyek meninjau dan mengatasi hambatan yang dihadapi organisasi non-pemerintah dalam memperoleh sertifikasi pemerintah untuk dapat membantu korban TIP.

¹³¹ USAID Thailand CTIP, "USAID Thailand Counter Trafficking in Persons," USAID, accessed September 18, 2022, <https://www.usaid.gov/asia-regional/fact-sheets/usaidthailand-counter-trafficking-persons>.

Beberapa dampak dari keterlibatan AS dalam penanganan perdagangan manusia di Thailand melalui USAID diantaranya ialah:¹³²

- a. Bekerja sama dengan Diginex Solutions, CTIP USAID Thailand, bekerja sama dengan proyek CTIP USAID Asia regional, meluncurkan Doc2Work, sebuah aplikasi yang memandu pekerja perikanan dalam mendapatkan dan memelihara dokumen kerja mereka. Hal ini bertujuan untuk mendukung regularisasi pekerja migran dari Kamboja dan Myanmar, mengurangi kerentanan mereka terhadap TIP.
- b. CTIP USAID Thailand bermitra dengan *World Vision* untuk memperkuat keterampilan dan koordinasi di antara anggota tim multidisiplin yang merupakan lembaga garis depan yang menangani identifikasi korban di provinsi Chiang Rai, Surat Thani, Sa Kaeo, dan Trat, memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi lebih banyak kasus TIP dan merujuk mereka untuk dukungan yang sesuai.
- c. Penerima hibah CTIP USAID Thailand melibatkan tokoh masyarakat dan relawan di provinsi sasaran dengan memperluas keterampilan dan peran mereka dalam mengidentifikasi risiko TIP sekaligus meningkatkan kesadaran akan hak-hak buruh.
- d. Menanggapi tantangan yang berasal dari pandemi COVID-19, proyek ini meluncurkan bot pemesanan khusus di aplikasi media sosial LINE populer yang disebut 'MayDay' untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan populasi berisiko. Bot pemesanan ini memberikan

¹³² USAID Thailand CTIP.

informasi yang diperlukan tentang perubahan peraturan migrasi, informasi pencegahan virus corona, dan cara agar dokumen kerja mereka tetap terkini dalam bahasa Burma, Khmer, dan Laos kepada pekerja migran.

- e. USAID Thailand CTIP mengimplementasikan kampanye nasional online 'Inside Khonnok' (ข้างในคนนอก) untuk membuka dialog dan menentang diskriminasi terhadap migran di Thailand serta untuk memperkuat suara migran. Kampanye ini menjangkau lebih dari 900.000 orang melalui cerita dan pesan yang dibagikan melalui video, kolaborasi dengan influencer media sosial, panel Facebook langsung, dan platform media sosial lainnya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan konsep peran yang dipaparkan oleh K. J Holsti yang dilakukan oleh peneliti, peran Amerika Serikat dalam menangani perdagangan manusia di Thailand adalah sebagai *regional protector*. Berdasarkan peran tersebut, Amerika Serikat berperan sebagai pemberi bantuan diantaranya dengan memberikan pelatihan-pelatihan dalam meningkatkan kapasitas lembaga dalam negerinya melalui FBI dan HSI, dengan beberapa proyek yang mereka kerjakan bersama dengan TICAC seperti “TITAC 101”, berperan dalam berbagi informasi melalui NCMEC di mana Thailand dapat mengakses informasi secara langsung untuk mengurangi eksploitasi seksual anak melalui NCMEC *CyberTips*.

Melalui USAID, Amerika berperan sebagai pemberi bantuan dana atau *foreign aid* dengan jenis *Bilateral foreign aid* dengan bantuan materil dalam program USAID *Counter Trafficking in Persons* (CTIP) Thailand disamping penggalakkan program USAID *Counter Trafficking in Persons* (CTIP) Asia untuk *Mekong Area*. Amerika Serikat membantu Thailand sebagai negara yang membutuhkan bantuan dalam menangani perdagangan manusia di negaranya disamping upaya Thailand yang juga membentuk TATIP dan TICAC dalam menangani permasalahan perdagangan manusia dalam negerinya.

Dari hasil penelitian, penanganan perdagangan manusia di Thailand menjadi cukup baik dengan berkurangnya kasus perdagangan manusia setiap tahunnya dari jangkauan waktu tahun 2018-2021. Selain itu, pencapaian juga

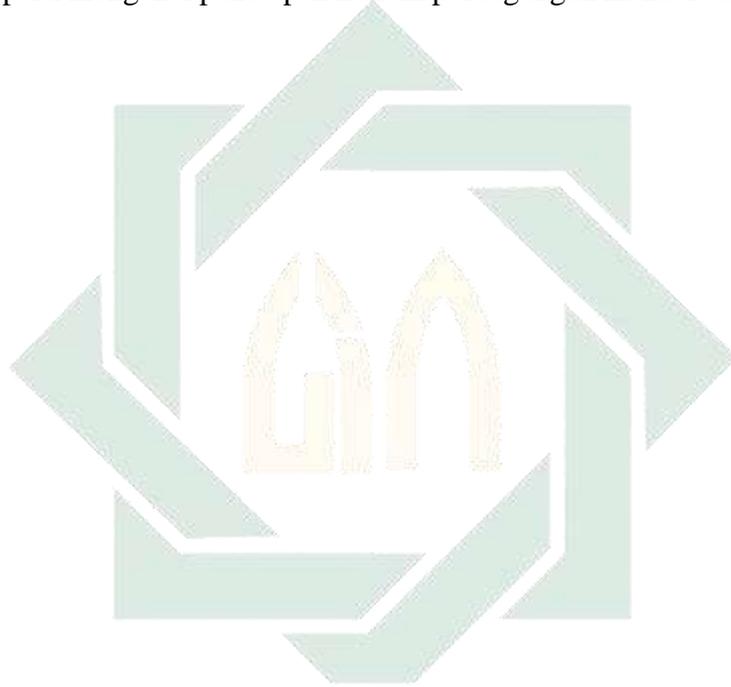
diraih oleh TICAC di kancah internasional, sebagai inisiatif Thailand terhadap pornografi anak dan aktivitas terkait di Internet dengan adanya pengakuan luas di antara komunitas penegak hukum internasional dan masyarakat sipil global. Bertahannya posisi Thailand dalam Rangka 2 oleh laporan TIP AS juga memperlihatkan peran positif Amerika Serikat dalam penanganan perdagangan manusia di Thailand.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memiliki beberapa saran yang ingin disampaikan, di antaranya yaitu:

1. Bagi pemerintah Thailand, peneliti berharap agar tidak ada lagi kepolisian Thailand yang terlibat kasus perdagangan manusia yang diakibatkannya pembentukan *5P strategy framework*. Selain itu juga, tetap meningkatkan TATIP dan TICAC sesuai dengan pembelajaran positif yang diterima dari Amerika Serikat. Karena hal tersebut sangat berpengaruh pada keamanan manusia di negara tersebut serta dapat menyangkut keamanan manusia negara-negara sekitarnya maupun negara yang terlibat dalam modus operandi kejahatan perdagangan manusia.
2. Bagi negara Amerika Serikat, peneliti memberikan saran untuk turut serta dalam membantu negara-negara lainnya yang memiliki kasus perdagangan manusia dengan peringkat-peringkat rendah dibawah negara Thailand sebagai prinsip negaranya yang sangat peduli akan perdagangan manusia di dunia yang dibuktikan melalui program TIP Amerika Serikat.

3. Peneliti juga berharap agar peneliti selanjutnya mengambil topik serupa dengan penelitian ini dengan konsep maupun teori yang berbeda dengan yang peneliti gunakan agar topik ini memiliki informasi yang lebih luas lagi seperti mengenai penetapan hukum perdagangan manusia di Thailand.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiana, Neli. "Peran United Nation Inter Agency Project on Human Trafficking Dalam Menangani Human Trafficking Di Thailand." *JOM FISIP* 9 (2022): 6–7.
- Agustina, Lidya. "Pengaruh Konflik Peran , Ketidakjelasan Peran , Dan Kelebihan Peran Terhadap Kepuasan Kerja Dan Kinerja Auditor." *Akuntansi* 1, no. 1 (2009): 42.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by Ella Deffi Lestari. 1st ed. Sukabumi, Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Arel-Bundock, Vincent, James Atkinson, and Rachel Augustine Potter. "The Limits of Foreign Aid Diplomacy: How Bureaucratic Design Shapes Aid Distribution." *International Studies Quarterly* 59, no. 3 (2015): 545. <https://doi.org/10.1111/isqu.12191>.
- Arifin, Resma Akbar. "OPTIMALISASI BARANG MILIK NEGARA." Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-batam/baca-artikel/15142/OPTIMALISASI-BARANG-MILIK-NEGARA.html>.
- Atasu-Topcuoglu, Reyhen. *Ideology and the Fight Against Human Trafficking*. New York: Routledge, 2015.
- Bales, Kevin. *Disposable People: New Slavery in the Global Economy*.

